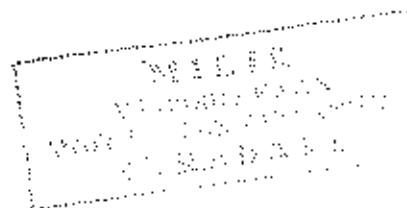


TESIS

PEMILU DAN PERILAKU MEMILIH
(Studi tentang Perilaku Memilih di Kalangan Guru pada Pemilu 1997
dan Pemilu 1999 di Kabupaten Kuningan Jawa Barat)



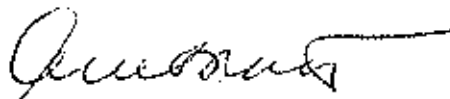
RUDI SUSILANA
099712715M

PROGRAM MAGISTER ILMU-ILMU SOSIAL
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002

LEMBARAN PENGESAHAN

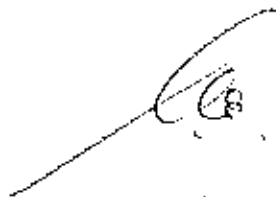
Laporan Penelitian ini telah disetujui

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. A. Ramlan Surbakti, MA
NIP. 130 702 133

Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Ilmu-ilmu Sosial,



Dr. Laurentius Dyson P., MA
NIP. 130 937 724

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke Hadirat Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas petunjuk, hidayah, dan karuniaNya saya bisa merampungkan tesis ini sebagai suatu persyaratan yang harus dipenuhi bagi penyelesaian studi pada Program Magister Ilmu-ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Tesis yang bertajuk Pemilu dan Perilaku Memilih (Studi tentang Perilaku Memilih di Kalangan Guru pada Pemilu 1997 dan Pemilu 1999) ini adalah laporan hasil penelitian yang saya lakukan di sebuah kabupaten yang terletak di ujung timur Propinsi Jawa Barat, suatu daerah yang tenang berhawa sejuk yang bernama Kuningan.

Secara umum laporan penelitian ini dipaparkan ke dalam 6 (enam) bagian, yaitu: Pendahuluan, Landasan Teori, Metodologi Penelitian, Hasil Penelitian, dan Pembahasan Hasil Penelitian serta Kesimpulan dan Implikasi

Begitu besarnya dorongan dan bantuan yang telah saya terima dalam penyelesaian tesis ini, tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak, baik secara perorangan maupun kelembagaan.

Tak lupa pula, kritik dan saran yang membangun bagi kesempurnaan tesis ini sangat saya harapkan. Semoga kehadiran tesis ini memberikan manfaat yang berarti, khususnya bagi pengembangan teori yang berkaitan dengan perilaku memilih, dan bagi pengembangan ilmu-ilmu sosial pada umumnya.

Kuningan, Januari 2002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Ucapan Terima Kasih

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pendekatan Perilaku Memilih.....	12
B. Teori Pilihan Rasional.....	16
C. Pilihan Rasional sebagai Penjelas Perilaku Memilih...	20
D. Perubahan Perilaku Memilih di Kalangan Guru pada Pemilu 1997 dan Pemilu 1999.....	23
E. Hipotesis Penelitian.....	24

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
	A. Variabel Penelitian.....	26
	B. Populasi dan Sampel.....	27
	C. Metode Penelitian.....	28
	D. Instrumen Penelitian.....	29
	E. Analisis Data.....	31
BAB IV	HASIL PENELITIAN	
	A. Pemilihan Umum Tahun 1999 di Kuningan.....	33
	B. Data Hasil Penelitian.....	43
	1. Data Penelitian Berasal dari Kuesioner.....	43
	2. Data Penelitian Berasal dari Wawancara.....	49
	C. Rangkuman Hasil Penelitian.....	63
BAB V	PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	68
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan.....	72
	B. Implikasi	73

Daftar Pustaka

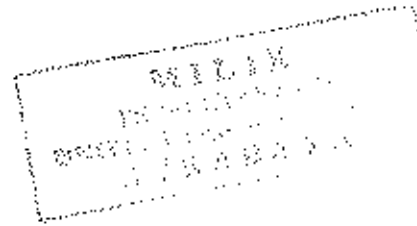
Lampiran-lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jenjang Sekolah dan Jumlah Guru PNS di Kabupaten DT II Kuningan	27
Tabel 2	Nama dan Alamat Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten DT II Kuningan	34
Tabel 3	Jumlah Pemilih Yang Terdaftar di Kabupaten DT II Kuningan pada Setiap Kecamatan	36
Tabel 4	Jumlah Calon Legislatif dari Setiap Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten DT II Kuningan	37
Tabel 5	Perolehan Suara dan Kursi pada Pemilu Tahun 1999 di Kabupaten DT II Kuningan	42
Tabel 6	Hasil Pengujian Hipotesis	66

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Tanggal 21 Mei 1998 merupakan tonggak baru dalam perjalanan sejarah Bangsa Indonesia, ketika Soeharto menyatakan berhenti dari kursi kepresidenan. Turunnya Soeharto dari puncak piramida kekuasaan ini menjadi pintu gerbang menuju era perpolitikan baru yang lebih demokratis, yakni dari depolitisasi-represif ke liberalisasi politik. Perubahan ini tampak dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah baru, seperti: pembebasan tapol dan napol, dibukanya kran kebebasan pers, dan revisi terhadap undang-undang politik.

Angin segar liberalisasi politik ini membawa dampak terhadap perubahan dalam segala bidang kehidupan, masyarakat menjadi semakin berani dan lugas mengungkapkan ide, pendapat, sikap, dan penilaiannya, bahkan pada sebagian masyarakat terjadi euforia. Maraknya demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia merupakan fakta empiriknya. Liberalisasi politik juga telah melahirkan partai-partai politik baru¹ yang mencoba mewadahi berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan sekaligus membuka kebebasan setiap orang untuk mencintukan

¹ Pada awalnya ada 141 partai yang terdaftar di Dep. Kehakiman, dan yang disahkan hanya 106 partai. Dari 106 partai tersebut, ada 60 partai yang memenuhi syarat untuk diverifikasi oleh Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (P3KPU) atau lebih dikenal dengan Tim Sebelas. Setelah diverifikasi, hanya 48 partai yang memenuhi syarat dan disahkan sebagai peserta Pemilu 1999 melalui SK Mendagri/Ketua LPU No. 3 Tahun 1999.

sendiri saluran politiknya, tak terkecuali para guru sebagai pegawai negeri yang selama ini digiring dengan segala pembenaran untuk memasuki dan memilih OPP tertentu.

Di masa Orde Baru, guru seringkali menjadi objek politik dengan dalih kepentingan pembangunan dan menjadi andalan OPP tertentu dalam pemecangan pemilu. Guru yang jumlahnya mencapai 43% dari seluruh pegawai negeri ini (anggota PGRI 1.6 juta orang) memang sangat potensial untuk dimanfaatkan², ditambah lagi dengan peranannya sebagai ujung tombak pendidikan yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat dan potensial untuk mempengaruhi masyarakat, termasuk mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan dalam pemilu. Namun, potensi besar yang dimiliki guru ini³ ternyata tidak memperoleh imbalan yang wajar dari pemerintah waktu itu, guru tidak mendapat manfaat yang setimpal. Di masa Orde Baru, guru merupakan profesi yang terpinggirkan. Penghargaan terhadap guru seringkali hanya sebatas "lips service" semata.⁴ Maka,

² PGRI anggotanya 1,6 juta orang, anggota dan para pengurusnya tersebar di 27 propinsi, 350 DT.II, 4.600 kecamatan, dan 25.000 desa (Kompas, Selasa 10 Agustus 1999, hal. 9)

³ Guru di masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, seringkali memiliki peran ganda, disamping sebagai pendidik juga sebagai tokoh masyarakat yang dijadikan panutan, termasuk sebagai tempat bertanya dalam hal pilihan politik. Dari survey pendahuluan yang dilakukan terhadap guru PNS di Kuningan, memperlihatkan bahwa lebih dari setengah (52.29%) guru aktif dalam organisasi pemerintahan desa (RT/RW, PKK, Karang Taruna, LKMD), DKM, dan organisasi lainnya. Dalam aktivitas politik, ada 43,12% yang pernah menjadi pengurus di Golkar dan tidak sedikit pula guru yang aktif dalam kepanitiaan Pemilu 1997 dan sebelumnya, yang diantaranya sebagai KPPS.

⁴ Dalam tulisan J. Sudariminta tentang "Citra Guru Semakin Terpuruk" dalam *Basis*, No.01-02 tahun ke 47, Jan-Feb 1998, digambarkan bahwa profesi guru merupakan profesi yang tidak mendapat prioritas dari pemerintah dalam hal peningkatan kesejahteraannya. Melalui analisis kesejarahan ia mencoba menggambarkan bagaimana profesi guru menjadi profesi yang semakin terpinggirkan di masa Orde Baru.

seiring dengan suasana politik yang memberikan kebebasan kepada setiap warga negara, termasuk guru, dalam menyalurkan aspirasi politik dan semakin bertambahnya informasi yang diperoleh mereka melalui berbagai media massa, bertambahnya wawasan, dan kesadaran politik, serta semakin banyaknya organisasi politik yang menjadi alternatif pilihan, dapat diduga adanya kecenderungan perubahan sikap dan perilaku memilih di kalangan guru.

Kecenderungan perubahan ini semakin nampak dari hasil survey yang dilakukan.⁵ Dari 117 kuesioner yang layak untuk diolah, ternyata 13 orang guru tidak memilih Golkar pada Pemilu 1997, sebanyak 50 orang (48.85%) tetap memilih Golkar/Partai Golkar, baik pada Pemilu 1997 maupun pada Pemilu 1999, sedangkan 54 orang (51.92%) memilih Golkar pada Pemilu 1997 dan memilih partai selain Partai Golkar pada Pemilu 1999. Jadi, ada perbedaan yang sangat mencolok, di mana pada Pemilu 1997, guru yang memilih Golkar sebanyak 104 orang (97.196%), tetapi pada Pemilu 1999, guru yang memilih Partai Golkar hanya 50 orang (48.85%). Perbedaan persentase ini dapat diartikan bahwa telah terjadi perubahan perilaku memilih yang signifikan di kalangan guru.⁶

⁵ Survey pendahuluan dilakukan setelah Pemilu 1999 berlangsung, tepatnya mulai tanggal 6 sampai 18 Juli 1999. Kuesioner disebar 207 eksemplar dengan bantuan 12 orang relawan yang berprofesi sebagai guru dari berbagai jenjang. Sampai dengan tanggal 30 Juli 1999, kuesioner yang masuk ada 154 buah, dan layak untuk diolah 117 buah, sisanya 24 buah tidak lengkap dan kurang valid dan 13 buah tidak memberikan informasi tentang pilihan pada Pemilu 1999.

⁶ Interpretasi ini sesuai dengan kriteria Kohout yang menyatakan bahwa ...Generally, %d's that are less than 10% may be considered small, while those over 20% are fairly strong for most table... (Frank J. Kohout, 1974, *Statistics for Social Scientists; A Coordinated Learning Sistem*, New York; John Wiley & Sons, Inc. hal. 73-75).

Adanya perubahan perilaku memilih yang relatif cepat di atas mungkin diakibatkan oleh adanya perubahan suasana dan kondisi politik yang sangat berbeda antara Pemilu 1997 dan Pemilu 1999. Pada Pemilu 1997 dengan format politik yang represif dan hegemonik, para guru digiring untuk memilih OPP tertentu. Dengan menggunakan jalur birokrasi berupa mobilisasi struktural⁷ dan tidak jarang juga dengan intimidasi, para guru tidak bisa menolak untuk tidak memilih Golkar dalam pemilu. Artinya perilaku memilih di kalangan guru lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal ketimbang faktor internal. Guru tidak merasa bebas untuk memilih; pilihan itu bukanlah pilihan atas kehendak bebasnya, tetapi pilihan itu lebih banyak ditujukan untuk mencari keselamatan atau memilih resiko yang paling aman. Sedangkan pada Pemilu 1999 dengan format politik yang lebih terbuka, dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah yang berkaitan dengan netralitas pegawai negeri sipil (PP Nomor 5 dan 12 Tahun 1999), yang membolehkan anggotanya untuk memilih partai politik secara bebas, diduga perilaku memilih di kalangan guru lebih banyak ditentukan oleh faktor pribadi pemilih. Para guru diduga akan memilih partai politik yang dinilainya sangat menguntungkan untuk dapat memaksimalkan tujuannya. Oleh karena itu, program partai, calon-calon yang diajukan, dan isu-isu politik dari suatu partai politik akan menjadi aspek yang dipertimbangan para guru dalam memilih. Para guru diduga akan memilih partai politik yang menurut

⁷ Salah satu bentuk mobilisasi ini adalah Dasagal, yaitu suatu program penggalangan massa pemilih yang dilakukan oleh Golkar melalui jalur B (birokrasi), di mana setiap PNS diminta untuk mendiskusikan 10 orang dari anggota keluarga/ sanak famili, tetangga, atau teman yang diharapkan bisa mendukung perolehan suara Golkar dalam pemilu. Formadir Dasagal diberikan oleh atasan pada PNS yang menjadi bawahannya.

pertimbangan rasionalnya mampu mewartahi kepentingan-kepentingannya. Jika memang demikian, maka dapat dikatakan bahwa perubahan perilaku memilih di kalangan guru tersebut lebih didasarkan pada pertimbangan rasional, yakni kalau pada Pemilu 1997, pilihan itu tidak didasarkan pada kehendak bebas dan lebih karena pertimbangan meminimalkan resiko, mencari aman agar tidak terkena sanksi, dan penekanan dari pejabat birokrasi.⁸ Tetapi pada Pemilu 1999, pilihan mereka itu lebih didasarkan kehendak pribadi dan pemaksimalan tujuan.

Apakah dugaan yang dikemukakan di atas sesuai dengan realitas yang sebenarnya? Benarkah perubahan perilaku memilih di kalangan guru di atas lebih banyak disebabkan oleh pertimbangan rasionalnya ataulah oleh faktor-faktor lainnya? Beberapa hasil penelitian tentang perilaku memilih memperlihatkan adanya berbagai perbedaan hasil temuan, antara peneliti yang satu dengan peneliti lainnya, antara lokasi penelitian yang satu dengan lokasi penelitian lainnya. Hasil penelitian Gerald Pomper menunjukkan bahwa predisposisi sosial dan ekonomi pemilih dan keluarga pemilih mempunyai hubungan yang signifikan dengan perilaku pemilih.⁹ Penelitian Lipset yang dilakukan di Amerika juga memperlihatkan bahwa kelompok minoritas di bidang ekonomi, politik, dan diskriminasi-diskriminasi tertentu cenderung memilih partai liberal, sedangkan kelompok mayoritas cenderung memilih partai

⁸ Hasil survey pendahuluan memperlihatkan bahwa empat hal yang paling dipertimbangkan dalam memilih di kalangan guru pada Pemilu 1997 berkaitan dengan loyalitas sebagai pegawai negeri sipil, anjuran/petunjuk atasan, aspirasi pribadi, dan takut sanksi administratif.

⁹ Muh. Aspar, "Beberapa Pendekatan Dalam Memahami Perilaku Memilih" dalam *Jurnal Ilmu Politik* No.16, Jakarta; Gramedia, hal. 48.

konservatif.¹⁰ Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Heath dan Allister yang dilakukan di Inggris menunjukkan bahwa pengaruh kelas pada perilaku sangat kecil.¹¹ Hasil penelitian tersebut seiring dengan temuan Gaffar yang menunjukkan bahwa pengaruh kelas dalam perilaku pemilih di Indonesia tidak dominan. Tidak ada perbedaan kecenderungan perilaku politik antara mereka yang termasuk kategori orang kaya ataupun orang miskin.¹²

Penelitian Denver di Inggris memperlihatkan bahwa sebagian besar pemilih memilih partai yang sama dari pemilu ke pemilu selama seperempat abad. Ia menyimpulkan bahwa pilihan seseorang harus dipahami sebagai pernyataan loyalitas (identifikasi partai) yang dibentuk oleh pengalaman (sosialisasi) sepanjang hidup.¹³ Penelitian Aspar yang dilakukan di Surabaya juga menunjukkan adanya kesesuaian antara afiliasi politik orang tua dengan pilihan anaknya. Dalam hal ini Aspar menjelaskan bahwa afiliasi politik ini terjadi karena adanya proses sosialisasi, dimana sosialisasi politik di keluarga mempunyai relevansi yang sangat besar pada politik. Selain itu, hasil penelitian Aspar juga memperlihatkan bahwa perilaku pemilih pemuda perkotaan juga didasarkan atas pertimbangan rasional, mereka menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan program yang disodorkan dan kandidat/ tokoh yang ditampilkan.¹⁴ Penelitian yang dilakukan Yuswanda dan kawan-kawan juga

¹⁰ *ibid.*

¹¹ *ibid.*, hal. 49.

¹² Afan Gaffar, 1992, *Javanese Voters: A Case Study of Election Under Hegemonic Party System*, Yogyakarta; UGM Press, hal. 173-174.

¹³ Muh. Aspar, *op.cit.*, hal. 50-51.

¹⁴ Mohammad Aspar, 1997, "Perilaku Politik Pemuda Perkotaan; Kasus Surabaya" dalam *Analisa*, Jakarta; CSIS, hal. 171-176.

memperlihatkan bahwa identifikasi partai (ideologi, ikatan keagamaan, ikatan emosional, simpatisan) di lingkungan mahasiswa FISIP UNPAD masih berpengaruh terhadap perilaku pemilih dalam pemberian suara pada pemilu 1992, meskipun tidak begitu kuat.¹⁵

Penelitian terbaru, yang peneliti peroleh, khususnya tentang penelitian perubahan perilaku pemilih yang dilakukan di Indonesia, pernah dilakukan oleh Kuncoro¹⁶ pada tahun 1998, yang meneliti perubahan perilaku memilih warga desa dari Pemilu 1971 sampai Pemilu 1997 di sebuah desa di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teoritis, pendekatan pilihan rasional ternyata tidak dapat menjelaskan perubahan perilaku memilih pada masyarakat di atas. Ada kecenderungan bahwa masyarakat memilih OPP lebih dipengaruhi oleh ajakan tetangga daripada program yang ditawarkan partai, masyarakat juga tidak memiliki informasi yang akurat, dan dalam menentukan pilihannya tersebut merasa tidak bebas.

Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Taqwa¹⁷ tentang perubahan perilaku memilih umat Islam di Lekkong, Enrekang tahun 1971 - 1992. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa mobilisasi politik Golkar yang bersifat

¹⁵ Awan Yuswanda dkk., 1993, *Pengaruh Identifikasi Partai Terhadap Perilaku Pemilih dalam Pemberian Suara pada Pemilu 1992 (Studi Kasus Mahasiswa Fisip Unpad)*, Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.

¹⁶ Bambang Kuncoro, 1998, *Perilaku Politik Warga Pinggiran (Studi tentang Perubahan Perilaku Memilih Warga Desa pada Pemilu tahun 1971 - 1997 di Desa Sunyalangu Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah)*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

¹⁷ M. Ridhah Taqwa, 1996, "Perilaku Politik Umat Islam; Kasus di Lekkong - Enrekang 1971-1992" dalam *Prisma* Nomor 3, Maret 1996 Hal. 35-46.

persuasif-kekeluargaan dan koersif-intimidasi telah mempercepat perubahan perilaku memilih umat Islam di Enrekang. Penelitian ini juga mempertegas suatu teori yang menyatakan bahwa “tindakan sosial merupakan fungsi dari sikap dan atau situasi sosial, ekonomi, dan kepentingan”.

Dari penelitian-penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku memilih dalam pemilu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berpengaruh, seperti: latar belakang sosial ekonomi, identifikasi partai berupa ideologi, ikatan keagamaan, ikatan emosional, dan afiliasi politik orang tua, serta pertimbangan rasional. Kalau demikian, apakah faktor-faktor ini juga berlaku dalam menjelaskan adanya perubahan perilaku memilih di kalangan guru dari Pemilu 1997 ke Pemilu 1999 dan manakah diantara berbagai faktor tersebut yang lebih dominan dibandingkan dengan faktor yang lainnya dalam mempengaruhi perilaku memilih di kalangan guru tersebut.

Berangkat dari keraguan tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mencari jawabannya. Dan berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih memfokuskan pada subjek penelitian yang memiliki karakteristik yang khusus dan relatif homogen, yakni para guru yang statusnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan individu sebagai unit analisisnya, bukan kelompok atau masyarakat, seperti analisis yang dipakai Kuncoro dan Taqwa pada penelitian terdahulu. Perbedaan lain adalah penelitian ini hanya memfokuskan pada Pemilu 1999, di mana pemilu ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, khususnya dengan pemilu-pemilu yang dilaksanakan selama masa Orde Baru.

B. Rumusan Masalah

Adanya perubahan perilaku memilih di kalangan guru yang cukup drastis dari Pemilu 1997 ke Pemilu 1999 merupakan fenomena yang menarik untuk dicari jawabannya, antara lain adalah mengapa mereka berubah dan faktor-faktor apa saja yang dominan menyebabkan perilaku memilih di kalangan guru tersebut berubah. Dugaan sementara perubahan itu berkaitan dengan pilihan rasional mereka dalam memilih. Permasalahannya adalah benarkah pilihan rasional merupakan faktor yang dominan dalam mempengaruhi perilaku memilih di kalangan guru pada Pemilu 1999? Dalam pengertian yang lebih rinci benarkah perilaku memilih di kalangan guru itu didasarkan pada pemaksimalan tujuan, penghitungan untung rugi, dan meminimalan resiko?

Untuk memudahkan pembahasan masalah tersebut, secara khusus masalah penelitian ini dibatasi sebagai berikut: Benarkah perilaku memilih di kalangan guru pada Pemilu 1999 didasarkan pada pertimbangan tentang program/ misi dan visi partai, calon anggota dewan yang diajukan, dan isu-isu politik yang diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah benar pilihan rasional sebagai faktor yang dominan dalam mempengaruhi perubahan perilaku memilih di kalangan guru dari Pemilu 1997 ke Pemilu 1999. Dengan kata lain, ingin membuktikan benarkah perilaku memilih guru pada Pemilu 1999 itu didasarkan pada

pemaksimalan tujuan, informasi yang memadai, dan meminimalan resiko serta kehendak bebas. Selain itu, penelitian ini ingin mengetahui berbagai faktor lain yang turut mempengaruhi perubahan perilaku memilih di kalangan guru tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menegaskan, melengkapi, dan membuktikan serta mungkin melahirkan suatu teori baru dalam hal perilaku memilih, khususnya dalam menjelaskan adanya fenomena perubahan perilaku memilih di kalangan guru dari Pemilu 1997 ke Pemilu 1999. Dengan memfokuskan pada teori pilihan rasional, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti khususnya bagi pengembangan teori tersebut dan umumnya bagi pengembangan teori-teori lainnya.

2. Pemerintah dan Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami perilaku memilih di kalangan guru dengan berbagai faktor penjelasnya. Lebih jauh lagi, temuan ini bisa dijadikan masukan dalam membuat berbagai kebijakan yang akan dilakukan, khususnya dalam memahami aspirasi politik guru. Dengan memahami perilaku memilih di kalangan guru ini juga bisa digunakan untuk memperoleh dukungan dalam pelaksanaan berbagai kebijakan pembangunan.

3. Program Studi Ilmu-ilmu Sosial

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan, khususnya berupa hasil-hasil penelitian sebagai pelengkap pustaka, bahan masukan, dan bahan kajian lebih lanjut bagi pengembangan program studi ini.

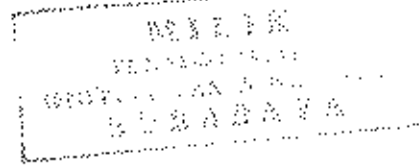
4. Peneliti Lebih Lanjut

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melahirkan inspirasi dan ide-ide baru tentang penelitian lanjutan yang terkait dan diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi pelaksanaan penelitian selanjutnya, baik dari sisi pengembangan teori dan pengembangan metodologi maupun dari sisi hasil penelitiannya itu sendiri.

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bagian ini akan dibahas mengenai berbagai pendekatan dalam perilaku memilih, teori pilihan rasional, pilihan rasional sebagai penjelas perilaku memilih, dan perilaku memilih di kalangan guru pada Pemilu 1997 dan Pemilu 1999 serta hipotesis penelitian.



A. Pendekatan Perilaku Memilih

Perilaku memilih yang dimaksud dalam penelitian ini ditinjau dari segi partai politik apa yang dipilih dan faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan oleh pemilih dalam pemilihan umum (pemilu). Untuk memahami perilaku pemilih (*voter behavior*) tersebut setidaknya ada empat pendekatan yang dapat digunakan untuk memberikan penjelasan, yaitu : pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan politik serta pendekatan pilihan rasional.

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis (*social determinism approach*) didasarkan pada asumsi bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih. Oleh karena itu, pengelompokan sosial, baik formal maupun informal merupakan sesuatu yang sangat

penting dalam memahami perilaku politik seseorang. Hal ini karena kelompok-kelompok sosial memiliki peranan di dalam membentuk sikap, persepsi, dan orientasi individu. Gerald Pomper menunjukkan bahwa predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih mempunyai hubungan yang signifikan dengan perilaku pemilih. Penelitian Lipset memperlihatkan bahwa kelompok minoritas di bidang ekonomi, politik dan diskriminan-diskriminan tertentu cenderung untuk memilih partai yang berpaham liberal atau partai yang berhaluan kiri. Sementara kelompok mayoritas cenderung mendukung partai konservatif atau sayap kanan. Selain itu penelitian-penelitian lain menunjukkan bahwa jenis kelamin juga merupakan variabel sosiologis yang dapat dihubungkan dengan perilaku pemilih ini, walaupun hubungannya tidak konsisten. Faktor geografis juga memiliki hubungan dengan perilaku pemilih. Kasus begitu kuatnya masyarakat di wilayah selatan Amerika dalam mendukung Partai Demokrat merupakan salah satu jawabannya.

2.. Pendekatan Psikologis

Pendekatan ini lahir sebagai reaksi terhadap pendekatan sosiologis. Pendekatan ini menganggap bahwa variabel-variabel sosiologis baru dapat dihubungkan dengan perilaku memilih bila sudah terjadi proses sosialisasi. Oleh karena itu, pendekatan psikologis mempertanyakan apakah benar variabel-variabel sosiologis yang mempengaruhi perilaku pemilih. Pendekatan psikologis lebih menekankan pada konsep sikap dan sosialisasi untuk menjelaskan perilaku pemilih.

Denver menyimpulkan bahwa teori-teori perilaku pemilih hanya benar dalam satu hal yaitu pilihan seseorang harus dipahami sebagai pernyataan loyalitas (identifikasi partai) yang dibentuk oleh pengalaman (sosialisasi sepanjang hidup). Hal ini ditunjukkan oleh data penelitian perilaku pemilih di Inggris yang memperlihatkan bahwa sebagian besar pemilih di Inggris memilih partai yang sama dari satu pemilu ke pemilu lainnya selama seperempat abad.

3. Pendekatan Politik

Untuk menjelaskan perilaku memilih di negara-negara yang sedang berkembang dengan birokrasi yang otoriter, faktor-faktor politik perlu diperhitungkan sebagai salahsatu faktor yang turut mempengaruhi perilaku memilih. Faktor-faktor politik ini bisa berupa prosedur atau aturan permainan dalam pelaksanaan pemilu maupun berupa tekanan struktural yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam mempengaruhi pilihan seseorang. Mobilisasi (tekanan dalam bentuk yang halus) merupakan bentuk pengarahan dari seseorang atau kelompok tertentu untuk memilih partai politik tertentu yang tidak mungkin dapat ditolak oleh individu atau kelompok yang mendapat pengarahan tersebut.

Mobilisasi Golkar melalui jalur B, pada Pemilu 1997 dan sebelumnya merupakan bukti yang kuat untuk menjelaskan pendekatan ini. Dalam kategori ini Lipset menyebutnya sebagai *group pressures to vote*. Selain mobilisasi, intimidasi juga merupakan bentuk tekanan struktural yang juga muncul pada pelaksanaan pemilu. Intimidasi bisa berupa ancaman administratif, ekonomi, dan ideologis.

4. Pendekatan Pilihan Rasional

Kekurangjelasan pendekatan-pendekatan di atas tentang bagaimana menjelaskan adanya variasi perilaku pemilih pada suatu kelompok yang secara sosiologis karakteristiknya sama dan adanya pergeseran pilihan dari satu pemilu ke pemilu lainnya pada orang dan status sosial yang sama, merupakan salahsatu penyebab lahirnya pendekatan pilihan rasional.

Pendekatan pilihan rasional yakin bahwa ada variabel lain yang turut menentukan dalam perilaku memilih seseorang. Menurut pendekatan ini, variabel tersebut adalah isu-isu politik dan siapa kandidat/calon yang diajukan. Dengan perkataan lain, pemilih menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional. Ia akan memberikan suara ke partai politik tertentu dengan mempertimbangkan untung rugi yang akan diperolehnya. Ia akan memilih alternatif yang paling menguntungkan (*maximum gained*) dan menghindari resiko yang paling kecil (*least risk*). Perilaku pemilih dalam pendekatan pilihan rasional disebut juga *consumer model of party choice*, artinya perilaku pemilih merupakan pengambilan keputusan yang bersifat instan, tergantung pada situasi sosial politik tertentu. Penelitian Pomper memperlihatkan bahwa (1) hubungan sosial ekonomi dengan pilihan pemilih semakin melemah dari pemilu ke pemilu, demikian pula dengan faktor demografis; (2) posisi isu-isu politik meningkat secara tajam dan berdampak langsung terhadap pilihan pemilih; (3) adanya penurunan pengaruh identifikasi partai terhadap pilihan pemilih dari pemilu ke pemilu.

B. Teori Pilihan Rasional

Teori pilihan rasional ini dipilih dengan alasan bahwa teori ini beranjak dari fenomena pada level mikro (perilaku individu), dimana hal ini sesuai dengan unit analisis yang dikaji dalam penelitian ini, yakni perilaku individu guru. Selain itu juga cocok dengan anggapan sementara, yakni adanya dugaan bahwa perubahan tersebut disebabkan oleh perilaku (tindakan) guru dalam memilih partai politik dalam pemilu sebagai perilaku yang rasional.. Dari berbagai teoritisasi pilihan rasional yang ada, hanya teori yang dikembangkan oleh James S. Colemanlah yang akan digunakan sebagai teori utama dalam penelitian ini, dengan alasan bahwa teori Coleman lebih dapat menjelaskan fenomena tersebut dan telah menjadi salah satu teori yang diperhitungkan dalam sosiologi kontemporer. Teori-teori lain akan digunakan sebagai pelengkap dalam pembahasan hasil penelitian.

Teori pilihan rasional dari Coleman beranjak dari ide dasar yang menyatakan bahwa orang bertindak secara bertujuan terhadap suatu tujuan, dengan tujuan (dan tentu saja tindakannya tersebut) diarahkan oleh suatu nilai atau preferensi. Pelaku juga akan memilih tindakan yang akan memaksimalkan kegunaan atau kepuasan dari kebutuhannya. Dua elemen kunci dari ide dasar tersebut adalah *pelaku* dan *sumber*. Pelaku adalah individu yang melakukan tindakan, sedangkan sumber adalah segala sesuatu yang dikendalikan dan diperhatikan oleh pelaku.

Dalam menjelaskan suatu tindakan rasional individu, Coleman menjelaskannya dalam tiga issue, yaitu: issue mikro-makro, issue makro-mikro, dan issue mikro-mikro. Issue mikro-makro adalah hubungan mikro terhadap makro,

artinya bagaimana kombinasi dari tindakan individu menimbulkan perilaku dari sistem. Issue makro-mikro menjelaskan bagaimana suatu sistem mendesak atau memaksa orientasi pelaku. Dan issue mikro-mikro menjelaskan suatu hubungan atau pengaruh dari tindakan individu terhadap tindakan individu yang lain.

Dalam menjelaskan fenomena mikro ke makro, kunci dasarnya adalah adanya pengakuan terhadap otoritas dan hak yang dimiliki oleh seseorang terhadap orang lain. Hal ini menimbulkan adanya subordinasi seseorang pelaku terhadap pelaku lain dan menciptakan fenomena makro yang paling mendasar bahwa suatu unit tindakan terdiri atas dua orang, lebih dari sekedar dua pelaku yang independen. Struktur yang dihasilkan berfungsi secara bebas dari para pelakunya. Selain memaksimalkan minatnya sendiri, dalam keadaan ini seorang pelaku berusaha agar minatnya diralisasikan juga oleh pelaku lain atau oleh unit kolektif yang independen.

Dalam menjelaskan fenomena makro, Coleman menjelaskannya dalam kasus *perilaku kolektif*. Perilaku kolektif adalah suatu transfer kontrol yang sederhana (dan rasional) dari tindakan seseorang terhadap pelaku lain, yang dibuat secara sepihak, dan bukan sebagai bagian dari suatu pertukaran. Tindakan itu dilakukan sepihak sebagai upaya untuk memaksimalkan kebutuhannya. Dalam kondisi normal, pemaksimalan tersebut mencakup usaha untuk menyeimbangkan kontrol diantara beberapa pelaku dan bisa menghasilkan suatu keseimbangan, tetapi karena transfer kontrol itu dilakukan sepihak maka pemaksimalan tersebut tidak selalu membawa pada keseimbangan sistem, juga ketidakseimbangan pada perilaku kolektif.

Fenomena makro lain adalah *norma*. Coleman mempertanyakan bagaimana dalam suatu kelompok pelaku rasional, suatu norma dapat timbul dan menetap. Ia berpendapat bahwa norma diprakarsai dan ditetapkan oleh beberapa orang yang melihat keuntungan yang dihasilkan dari ketaatan terhadap norma dan kerugian yang berasal dari penyimbangan terhadap norma-norma. Orang-orang berkeinginan untuk melepaskan beberapa kontrol terhadap perilaku mereka, tapi dalam prosesnya mereka justru mendapatkan beberapa kontrol (melalui norma) melalui perilaku orang lain. Jadi, pelepasan hak-hak parsial dari kontrol atas tindakan seseorang dan penerimaan hak-hak parsial dari kontrol atas tindakan orang lain itulah yang memunculkan suatu norma.

Norma bisa menguntungkan bagi sebagian orang dan tidak menguntungkan bagi yang lainnya. Dalam beberapa kasus, para pelaku melepaskan hak mereka untuk mengontrol tindakan mereka sendiri kepada orang-orang yang memprakarsai dan memantapkan norma-norma. Norma demikian akan efektif. bila timbul suatu konsensus bahwa beberapa orang memiliki hak untuk mengontrol (melalui norma) tindakan dari orang lain dan keefektifan ini tergantung pada kemampuan untuk menjalankan konsensus tersebut. Konsensus dan pelaksanaannya yang mencegah terjadinya ketidakseimbangan dari pelaku kolektif.

Pada tataran mikro, Coleman menjelaskan tentang internalisasi norma-norma. Ia memandang bahwa internalisasi norma sebagai suatu pengukuhan dari suatu sistem sanksi internal; orang memberi sanksi pada diri mereka sendiri bila mereka menyimpang dari norma. Coleman juga melihatnya dalam term ide dari seorang

pelaku atau kumpulan pelaku yang berusaha untuk mengontrol orang lain dengan memegang norma-norma yang terinternalisasi dalam diri mereka. Jadi, norma-norma adalah fenomena level makro yang muncul pada dasar dari tindakan bertujuan pada level mikro. Sekali sudah muncul, norma, melalui sanksi atau ancaman dari sanksi, mempengaruhi tindakan individu. Tindakan-tindakan tertentu mungkin didukung, sedang yang lainnya tidak. Dalam pergerakannya menuju level makro, ia memaparkan tentang pelaku korporasi. Dalam kolektivitas, pelaku mungkin tidak bertindak berdasarkan minat mereka sendiri, tetapi harus bertindak sesuai dengan minat kolektivitas. Namun demikian ada beberapa mekanisme untuk bergerak dari pilihan individu ke pilihan kolektif. Sebagai contoh; pemungutan suara, prosedur menabulasi suara-suara individu, dan memajukan suatu keputusan kolektif adalah dimensi mikro ke makro, sedangkan daftar calon yang diajukan oleh kolektivitas mencakup dimensi makro ke mikro.

Selanjutnya Coleman menjelaskan bahwa pelaku korporasi dan pelaku manusia (individu) sama-sama memiliki tujuan. Tidak menutup kemungkinan bahwa individu mengejar tujuan mereka sendiri yang berbeda dengan tujuan korporasinya. Konflik interes ini membantu dalam memahami sumber penentangan terhadap otoritas korporasi. Hubungan mikro ke makro adalah cara individu-individu melepaskan otoritas dari struktur korporasi dan memberikan legitimasi bagi yang terlibat dalam penentangan tersebut dan hubungan makro ke mikro adalah kondisi pada level makro tertentu yang membawa individu untuk melakukan pelepasan dan penanaman otoritas tersebut.

Coleman mengkritik sebagian besar teori sosial yang mengadopsi pandangan yang disebutnya *homo sociologicus*, karena hanya menekankan pada proses sosialisasi dan hubungan erat antara individu dan masyarakat sehingga tidak dapat digunakan untuk menjelaskan kebebasan individu untuk bertindak sesuai dengan keinginan mereka walaupun mereka dipaksa. Perspektif tersebut kurang mampu mengevaluasi tindakan dari sistem sosial, sedangkan *homo economicus*, dalam pandangan Coleman, memiliki seluruh kemampuan tersebut.

C. Pilihan Rasional sebagai Penjelas Perilaku Memilih

Dengan mendasarkan diri pada karakteristik guru sebagai salahsatu bagian dari pegawai negeri sipil (PNS), yang pada masa Orde Baru digiring untuk menyalurkan aspirasinya ke OPP tertentu, tetapi kini pada masa Orde Reformasi, mereka bebas menentukan pilihannya, maka perspektif yang tepat digunakan untuk menjelaskan perubahan perilaku memilih di kalangan guru tersebut adalah pendekatan/ perspektif pilihan rasional (*rational choice*). Perspektif pilihan rasional sebagai penjelas dalam memahami perilaku selaras dengan tiga argumen yang dikemukakan oleh Melberg sebagai berikut:

1. *That rational choice models are valuable in sociology because they provide a "rule of thumb" about how an action is chosen (a mechanism).* (Model pilihan rasional bermakna dalam sosiologi karena model-model ini merupakan suatu model yang "praktis" tentang bagaimana suatu tindakan itu dipilih (suatu mekanisme)

2. *The rational choice models are useful in explaining social exchange in the sense that the choice of action in an interactive situation is often governed by attempted maximization according to aims.* (Model pilihan rasional berguna dalam menjelaskan pertukaran sosial dalam pengertian bahwa pilihan suatu tindakan dalam suatu situasi interaktif seringkali diatur oleh pemaksimalan yang diusahakan dalam mencapai tujuan).
3. *That rational choice models very good at explaining how the problem of collective action may exist and be solved.* (Model pilihan rasional sangat baik untuk menjelaskan bagaimana suatu masalah tentang aksi kolektif menjadi muncul dan dipecahkan).¹⁸

Dalam menjelaskan suatu perilaku individu, perspektif pilihan rasional ini didasarkan pada tiga asumsi sebagai berikut :

1. Individu adalah *self seeking* (mencari perolehan untuk kepentingan diri sendiri); memaksimalkan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki (preferensi). Manusia adalah binatang ekonomi (*economic animal*).
2. Setiap individu manusia mencari dan memiliki informasi (*information seeking*) yang memadai dalam rangka mencapai tujuan *self seeking*.

¹⁸ Hans O. Melberg, 1993, Three Arguments about Rational Choice Theory in Sociology, <http://home.sol.no/hansom/papers/930520.htm>.

3. Setiap individu mampu memilih alternatif tindakan yang dianggap paling efisien untuk mencapai tujuan (*calculating subject*). Manusia itu makhluk rasional, yakni memilih cara atau alternatif yang paling efisien untuk mencapai tujuan.¹⁹

Berbeda dengan prespektif lainnya, seperti: perspektif sosiologis, psikologis, dan politik, perspektif pilihan rasional memandang bahwa pemilih sebagai sesuatu yang aktif. Pemilih tidak terbelenggu oleh karakteristik sosilogis dan psikologis, tetapi ia bebas bertindak sesuai dengan situasi sosial politik yang ada. Perilaku memilih tidaklah tetap, tetapi berubah-ubah sesuai dengan kehendak bebas dan pertimbangan-pertimbangan rasional pemilih terhadap isu-isu politik dan calon-calon pemimpin yang diajukan oleh partai-partai politik.

Dalam perspektif pilihan rasional, seorang pemilih akan menjatuhkan pilihannya ke OPP tertentu berdasarkan perhitungan untung rugi, ia akan memilih OPP yang dianggap akan memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya dan sedikit mungkin menekan kerugian yang akan dideritanya. Seorang pemilih juga tidak hanya mempertimbangkan secara rasional keuntungan dan kerugian yang akan diperolehnya, tetapi juga memilih resiko yang paling kecil sebagai alternatif pilihannya., bahkan ia lebih mendahulukan unsur keselamatan.

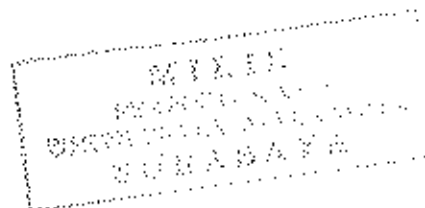
¹⁹ Dikutip dari catatan perkuliahan Teori Sosial Mikro yang diberikan oleh Dr. Ramlan Subakti, M.A. pada tanggal 11 Juni 1997.

D. Perubahan Perilaku Memilih di Kalangan Guru pada Pemilu 1997 dan Pemilu 1999

Perubahan perilaku memilih yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan perilaku memilih di kalangan guru dari Pemilu 1997 ke Pemilu 1999. Perubahan perilaku memilih disini artinya perbedaan antara perilaku memilih pada Pemilu 1997 dan perilaku memilih pada Pemilu 1999.²⁰

Pada Pemilu 1997 dengan format politik yang represif dan hegemonik, melalui pembenaran bahwa anggota Korppri harus loyal termasuk para guru yang digiring untuk memilih OPP tertentu. Dengan menggunakan jalur Birokrasi berupa mobilisasi struktural dan tidak jarang juga dengan intimidasi, para guru tidak bisa menolak untuk tidak memilih Golkar dalam pemilu. Survey pendahuluan yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa dua aspek yang paling dipertimbangkan oleh guru dalam memilih pada Pemilu 1997 berkaitan dengan "sebagai PNS harus loyal, yakni memilih Golkar" dan "pilihan itu atas anjuran atasan". Pilihan guru tersebut dapat dipahami sebagai pilihan yang rasional, yakni meminimalkan resiko yang akan dihadapi. Bagi mereka yang penting adalah aman, artinya tidak mendapatkan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi ekonomis. Pilihan tersebut memang didasarkan pada pertimbangan untung rugi, walaupun pilihan itu lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal, dan bukan oleh kehendak bebas sebagai pribadi.

²⁰ Surbakti memberikan ilustrasi tentang perubahan sebagai berikut "pada titik t (waktu), sistem sosial (S) memiliki karakteristik A, B, C,....dan N, tetapi pada titik t+k (beberapa periode waktu kemudian), karakteristik S menjadi A', B', C',....N'. Perbedaan karakteristik S pada t dengan karakteristik S pada t+k disebut perubahan (Ramlan Surbakti, 1992, Memahami Ilmu Politik, Jakarta; Gramedia Widiasarana Indonesia, hal.237).



Jadi, perilaku memilih guru dalam Pemilu 1997 dapat dikatakan sebagai pilihan yang rasional, namun pilihan itu bukan atas kehendak bebas melainkan lebih banyak ditentukan oleh tekanan-tekanan struktural, berupa mobilisasi dan intimidasi yang birokratis.

Sedangkan pada Pemilu 1999 dengan format politik yang lebih terbuka dan dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan pegawai negeri sipil dalam partai politik yang membolehkan anggotanya untuk memilih partai politik secara bebas, maka perilaku memilih di kalangan guru diduga lebih banyak didasarkan pilihan rasional atas kehendak bebas. Para guru memilih partai politik yang dinilai sangat menguntungkan untuk dapat memaksimalkan tujuannya. Oleh karena itu, program partai, calon-calon yang diajukan, dan isu-isu politik dari suatu partai politik akan menjadi aspek yang sangat dipertimbangkan para guru dalam memilih. Para guru akan memilih partai politik yang menurut pertimbangan rasionalnya mampu mewartakan kepentingan-kepentingannya. Bermunculannya partai politik baru menambah alternatif pilihan bagi para guru dalam memilih sehingga wajar bila pilihan guru itu sangat bervariasi.

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan di atas, diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: pilihan rasional merupakan faktor yang dominan dalam mempengaruhi perubahan perilaku memilih di kalangan guru dari Pemilu 1999

dengan kata lain didasarkan pada pemaksimalan tujuan dan meminimalan resiko, kehendak bebas secara pribadi, dan didasarkan pada informasi yang memadai atau dalam artian bahwa perilaku memilih di kalangan guru pada Pemilu 1999 itu didasarkan pada pertimbangan tentang program/misi dan visi partai, calon anggota dewan yang diajukan, dan isu-isu politik serta kehendak bebas secara pribadi daripada faktor-faktor lainnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ketiga ini berisi paparan tentang variabel penelitian, populasi dan sampel, metode penelitian, instrumen penelitian, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian.

A. Variabel Penelitian

Key word dari penelitian ini adalah perilaku memilih dan pemilu. Dalam penelitian ini ada dua variabel utama, yakni: pilihan guru pada Pemilu 1997 dan Pemilu 1999 sebagai variabel dependen (Y) dan pertimbangan pilihan guru dalam memilih sebagai variabel independen (X). Pilihan guru dalam pemilu dapat dipilah menjadi 2 kategori, yaitu: memilih Golkar/ Partai Golkar dan memilih bukan Golkar/Partai Golkar. Sedangkan pertimbangan guru dalam memilih dirinci menjadi 4 kategori, yaitu: pemaksimalan tujuan, meminimalan resiko, pertimbangan untung rugi, dan kehendak bebas serta sumber informasi yang dominan. Sebagai variabel kontrol (Z) digunakan variabel usia, jenis kelamin, tempat tinggal, tingkat pendidikan, dan ekonomi serta aktivitas sosial-politik.

B. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang berada di wilayah Kabupaten DT II Kuningan Propinsi Jawa Barat. Dari 948 sekolah berbagai jenjang yang ada di Kuningan, tercatat ada 6362 orang guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Secara rinci populasi guru dan jenjang sekolahnya dapat digambarkan pada tabel berikut:

TABEL 1
JENJANG SEKOLAH DAN JUMLAH GURU PNS
DI KABUPATEN DT II KUNINGAN

JENJANG SEKOLAH	JUMLAH SEKOLAH	JUMLAH GURU
1. SD/ MI	795	4007
2. SLTP/ MTS	104	1560
3. SMU-K/ MA	49	795
TOTAL	948	6362

Sumber : Penyusunan Rencana Program (PRP) Kandepdikbud Kabupaten DT II Kuningan Propinsi Jawa Barat, Mei 1999.

Sampel penelitian adalah guru yang berstatus sebagai PNS yang mengajar pada berbagai jenjang sekolah, baik sekolah dasar (SD dan MI), sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP dan MTs), dan sekolah lanjutan tingkat atas (SMU-K dan MA). Sampel diambil secara acak berdasarkan *sample frame* yang telah ada, yakni berupa daftar guru yang berstatus PNS yang tercatat di Kandepdikbud (Depdiknas) Kabupaten DT II Kuningan. Kemudian sampel dipilih dengan cara undian sebanyak

120 orang²¹ tanpa membedakan jenjang dan jenis sekolah dimana guru tersebut mengajar. Pengambilan sampel acak dilakukan dengan alasan bahwa populasi penelitian ini relatif bersifat homogen dan agar setiap orang berkesempatan sama untuk menjadi sampel penelitian, sehingga sampel yang diambil diharapkan dapat mewakili populasi.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan setelah pemilu 1999 berlangsung dengan menggunakan metode survey. Metode survey digunakan dengan alasan bahwa pertama, bukan hanya untuk mendeskripsikan tentang suatu keadaan, melainkan juga untuk menjelaskan hubungan berbagai variabel yang diteliti dari responden yang relatif banyak. Kedua, metode survey digunakan karena data yang akan diungkap berkaitan dengan perilaku memilih yang masih dianggap sebagai persoalan politik yang spesifik dan menyangkut kerahasiaan responden, sehingga data yang diperoleh lebih objektif.

Survey dilakukan di Kuningan, yaitu nama salahsatu kabupaten di Propinsi Jawa Barat. Kabupaten Kuningan ini terdiri atas 19 kecamatan dan tersebar menjadi

²¹ Dari beberapa buku rujukan dijelaskan berbeda-beda mengenai jumlah sampel dalam suatu penelitian. Ida Bagoes Mantra dan Kasto dalam Singarimbun tidak membatasi berapa besarnya jumlah sampel yang diambil, yang penting mempertimbangkan 4 faktor, yaitu: derajat keseragaman, presisi, rencana analisis, dan mempertimbangkan tenaga, biaya, dan waktu (hal.150-152), Krejchi dan Morgan menentukan sampel dengan menggunakan grafik, dan Donald Ary dkk. (Arief Furchan, penterjemah) menganjurkan agar jumlah sampel yang diambil 10-20% dari jumlah populasi (hal. 198). Beberapa buku statistic bahkan menegaskan bahwa sample lebih dari 100 orang sudah tergolong pada kategori sample besar.

369 desa/kelurahan.²² Dilakukan di Kabupaten Kuningan dengan alasan bahwa penelitian ini adalah penelitian sampel, yang pada dasarnya bisa dilakukan di mana saja yang penting adalah profesi guru atau PNS masih menjadi pekerjaan yang diminati banyak orang. Demikian pula kondisi yang ada di Kabupaten Kuningan, sepanjang pengetahuan peneliti, Kuningan adalah sebuah kota kecil, dimana bidang pekerjaan dan profesi masih relatif belum berkembang. Hampir tidak ada perusahaan atau pabrik yang dapat dikategorikan besar. Mata pencaharian penduduk pada umumnya bertani. Bidang pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil, termasuk guru, masih menjadi idaman sebagian besar masyarakat, sehingga profesi ini mendapat tempat yang terhormat. Posisi guru dan pegawai negeri lainnya yang sangat strategis ini, dalam pemilu-pemilu sebelumnya, seringkali dimanfaatkan oleh OPP tertentu melalui jalur B (birokrasi) guna mempengaruhi perilaku memilih masyarakat. Alasan kedua adalah alasan kepraktisan semata, dimana peneliti sudah banyak mengenal daerah ini, sehingga diharapkan dalam pelaksanaan penelitian tidak banyak menghadapi hambatan yang berarti, baik dari segi tenaga, waktu, maupun biaya.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner yang disusun berdasarkan variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian ini. Kuesioner digunakan dengan alasan bahwa pertama, dengan sifatnya yang tertulis memungkinkan data yang diperoleh lebih akurat karena responden lebih bebas dalam mengisinya, apalagi

²² Peta Wilayah Kabupaten DT II Kuningan Propinsi Jawa Barat (1999).

dengan tanpa mencantumkan identitas diri. Kedua, dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang respondennya relatif banyak dengan variabel yang kompleks. Ketiga, data yang diperoleh mudah untuk dianalisis karena pertanyaan yang diajukan sama.

Sesuai dengan masalah yang akan dikaji, instrumen penelitian yang digunakan ditujukan untuk mengungkap data/ informasi tentang: Pertama, identitas responden berupa usia, jenis kelamin, tempat tinggal, tingkat pendidikan, dan ekonomi serta aktivitas sosial-politik yang digunakan sebagai variabel kontrol. Kedua, pilihan guru dalam Pemilu 1997 dan Pemilu 1999, yaitu: memilih Golkar/ Partai Golkar dan memilih bukan Golkar/Partai Golkar sebagai variabel dependen. Ketiga, pertimbangan guru dalam memilih, yaitu: pemaksimalan tujuan, minimalisasi resiko, pertimbangan untung rugi, dan kehendak bebas sebagai variabel independen.

Untuk menjaga agar data yang diperoleh memiliki validitas, reliabilitas, readabilitas yang dipersyaratkan, oleh karena itu sebelumnya kuesioner ini diujicoba dan direvisi.

Selain kuesioner, dalam penelitian ini digunakan pula beberapa pedoman wawancara. Hasil wawancara ini dimaksudkan sebagai data dan informasi untuk melengkapi data/ informasi yang diperoleh dari kuesioner. Wawancara dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap beberapa responden (yang mengisi kuesioner) yang dipilih dan dianggap dapat mewakili sampel penelitian ini. Adapun informasi mengenai responden dan partai yang menjadi pilihannya dapat dilihat dari tanda/ kode yang dibuat peneliti pada setiap berkas instrumen yang diberikan kepada

responden.. Dengan adanya tanda/ kode tersebut peneliti dapat dengan tepat dan mudah mengetahui siapa responden dan apa jawaban dari responden. Responden yang diwawancarai adalah: Pertama, responden/ guru yang perilaku memilihnya tetap, yakni memilih Golkar/ Partai Golkar pada Pemilu 1997 dan Pemilu 1999. Kedua, responden/ guru yang perilaku memilihnya berubah, yakni memilih Golkar pada Pemilu 1997 tetapi memilih partai selain Partai Golkar pada Pemilu 1999. Ketiga, responden/ guru yang pada Pemilu 1997 dan Pemilu 1999 tidak memilih Golkar/ Partai Golkar. Jumlah responden yang diwawancarai adalah 15 orang atau lebih dari 10% sampel penelitian.

E. Analisis Data

Sesuai dengan masalah dan hipotesis yang diajukan, analisis data yang akan digunakan adalah chi-kuadrat dengan berpedoman pada teknik dipakai oleh Kohout dan Siegel²³ Pemilihan analisis data ini didasarkan pada jenis data yang diungkap dalam penelitian ini relatif heterogen, yakni jenis data dalam penelitian ini berupa data nominal dan ordinal, sehingga akan lebih aman dan mudah bila chi-kuadrat dipakai dalam pengolahannya.

Rumus chi-kuadrat yang digunakan dalam pengolahan data ini adalah :

²³ Kohout, Frank J., 1974, *Statistics for Social Scientist*, New York; John Wiley & Sons.: Frank M. Andrews, hal. 389-403 dan Siegel, Sidney, 1985, *Statistik Nonparametrik untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta; Gramedia, hal. 130-138. Khususnya Kohout memberikan contoh-contohnya berkaitan dengan pilihan masyarakat dalam pemilu di Amerika.

Pertama, untuk menghitung ada tidaknya perbedaan dua variabel independen dengan formula 2x2 digunakan rumus :

$$\chi^2 = \frac{N ([AD - BC] - N/2)}{(A+B) (C+D) (A+C) (B+D)}$$

Kedua, untuk menghitung ada tidaknya perbedaan lebih dari dua variabel independen dengan digunakan rumus:

$$\chi^2 = \sum (O_{ij} - E_{ij}) / E_{ij}$$

Keterangan :

O_{ij} adalah jumlah frekuensi observasi

E_{ij} adalah jumlah frekuensi ekspektasi/ harapan

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Bagian ini akan memaparkan tentang data-data hasil penelitian berupa pelaksanaan pemilihan umum yang ada di Kuningan (sebagai lokasi penelitian), data-data hasil penelitian yang diungkap dari kuesioner, dan data atau informasi yang diungkap dari wawancara.

A. Pemilihan Umum Tahun 1999 di Kuningan

Selain untuk memilih anggota DPRD Pusat dan DPRD I, pemilu di Kuningan dilakukan untuk memilih anggota DPRD II yang berjumlah 45 kursi, 40 kursi diperebutkan oleh partai politik peserta pemilu dan 5 kursi dijatahkan untuk perwakilan TNI-Polri.

Jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih, baik melalui pendaftaran aktif maupun pasif, tercatat sebanyak 603.598 orang atau 94.21% dari jumlah penduduk yang berhak memilih. Partai politik peserta pemilu di Kuningan yang terdaftar sebanyak 35 partai politik dari 48 partai politik yang terdaftar secara nasional. Tiga belas partai politik lainnya, yaitu: Partai Masyumi Baru (PMB), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Abul Yatama (PAY), Partai Kebangsaan Merdeka (PKM), Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB), Partai Rakyat Demokratik (PRD), Partai Katolik Demokrat (PKD), Partai Rakyat Indonesia (PARI), Partai

Politik Islam Indonesia Masyumi, Partai Solidaritas Pekerja (PSP), Partai Buruh Nasional (PBN), Partai MKGR, dan Partai Inta Damai (PCD), tidak mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di Kuningan.

Berikut ini adalah 35 partai politik yang resmi mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di Kuningan :

TABEL 2
NAMA DAN ALAMAT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
DI KABUPATEN DT II KUNINGAN

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	ALAMAT DI KUNINGAN	TELP.
1.	Partai Indonesia Baru (PIB)	Jl. Siliwangi No. 64 Ciawigebang	82306/ 85889
2.	Partai Kristen Nasional (Krisna)	Jl. Kepuh No. 155/122	81774
3.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	Jl. Setianegara Cilimus	63903
4.	Partai Aliansi Demokrat Indonesia (PADI)	Jl. Raya Jalaksana No. 126	82875/ 84540
5.	Partai Kebangkitan Muslim Indonesia (KAMI)	Jl. Raya Bojong No. 324 Cilimus	-
6.	Partai Ummat Islam (PUI)	Jl. Siaga III No. 28	82690
7.	Partai Kebangkitan Ummat (PKU)	Jl. RE Martadinata Ciporang	-
8.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Jl. Raya Ciloa	83857
9.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Jl. Raya Kramatmulya No. 8	86163
10.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII-1905)	Jl. Ir. H. Juanda No. 69	84445
11.	Partai Amanat Nasional (PAN)	Jl. Veteran No. 91	81713
12.	Partai Bulan Bintang (PBB)	Jl. Syeh Maulana Akbar No. 25	81932
13.	Partai Pilihan Rakyat (PILAR)	Jl. Raya Bandorasawetan Cilimus (dekat Pabrik Aqua)	-
14.	Partai Keadilan (PK)	Jl. Pramuka No. 11	63808
15.	Partai Nahdatul Ummat (PNU)	Desa Sindangsari Garawangi	-
16.	PNI Front Marhaen (PNI-FM)	Jl. Raya Bojong No. 90/94 Cilimus	63657

17.	Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	Jl. Dewi Sartika No. 17	81566
18.	Partai Republik (PR)	Jl. RE Martadinata No. 95	82510
19.	Partai Islam Demokrat (PID)	Jl. H. Bakri No. 879 Cilimus	64407
20.	Partai Musyawarah Rakyat Banyak (MUBA)	Jl. Desa Sindangkempeng Mandirancan	65166
21.	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)	Jl. Paleben No. 33/76 Cigugur	-
22.	Partai Golongan Karya (Golkar)	Jl. RE Martadinata No. 52	81651
23.	Partai Persatuan (PP)	Jl. Eyang Weri No. 408	83446
24.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Jl. Ir. H. Juanda No. 38	81551
25.	Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI)	Jl. Siliwangi No. 197	81749
26.	Partai Daulat Rakyat (PDR)	Jl. Desa Pancalang Mandirancan	65166
27.	Partai Bhineka Tunggal Ika (PBI)	Jl. Dewi Sartika No. 11	83427
28.	Partai Nasional Bangsa Indonesia (PNBI)	Jl. Desa Pakembangan Mandirancan	64696
29.	Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI)	Jl. Komplek Ponpes AJ'Anwar Kadugede	-
30.	Partai Nasional Demokrat (PND)	Jl. Kerikil No. 138 Cilimus	63592
31.	PNI Masa Marhaen (PNI-MM)	Jl. Lingk. Cilame Rt.05/08 Cirendang	-
32.	Partai Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)	Jl. Desa Kaduagung Rt.01/04 Garawangi	-
33.	Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)	Jl. Ajid No. 4	84654
34.	Partai Ummat Muslimin Indonesia (PUMI)	Jl. Raya Cikaso No. 37	84319
35.	Partai Pekerja Indonesia (PPI)	Jl. Otista No. 227	82160

Keterangan:

Nomor bukan nomor partai, tetapi nomor urut pendaftaran.

Sumber data : PPD II Kuningan tertanggal 19 Mei 1999.

Tahap persiapan pemilu (pendaftaran pemilih, pendaftaran partai politik peserta pemilu, dan pendaftaran calon anggota legislatif) dan tahap pelaksanaan kampanye berjalan cukup lancar. Hampir tidak ada permasalahan yang berarti pada tahap pendaftaran pemilih, pendaftaran partai politik peserta pemilu, dan pendaftaran

calon anggota legislatif. Berikut ini adalah jumlah pemilih yang terdaftar di daerah pemilihan Kabupaten DT II Kuningan :

TABEL 3
JUMLAH PEMILIH YANG TERDAFTAR
DI KABUPATEN DT II KUNINGAN PADA SETIAP KECAMATAN

NO.	KECAMATAN	L	P	JUMLAH
1.	Kuningan	24.619	24.298	48.917
2.	Ciniru	9.928	10.090	20.018
3.	Karamatmulya	13.649	1.359	27.242
4.	Cigugur	12.710	12.382	25.092
5.	Luragung	23.141	2.353	46.677
6.	Cibingbing	17.120	1.714	34.265
7.	Ciwaru	13.681	14.028	27.709
8.	Ciawigebang	29.067	2.980	58.870
9.	Cidahu	18.244	18.905	37.149
10.	Garawangi	18.630	19.557	38.187
11.	Lcbakwangi	22.809	23.613	46.422
12.	Cilimus	19.939	20.808	40.747
13.	Jalaksana	17.255	17.881	35.236
14.	Mandirancan	12.299	13.200	25.499
15.	Pasawahan	6.932	6.840	13.772
16.	Kadugede	12.187	12.556	24.743
17.	Darna	13.334	13.156	26.490
18.	Subang	8.619	8.956	17.575
19.	Selajambe	4.447	4.643	9.090
	JUMLAH	298.610	304.988	603.598

Sumber : PPD II Kabupaten Kuningan

Sedangkan daftar calon legislatif dari tiap partai politik dapat dirinci sebagai berikut:

TABEL 4
JUMLAH CALON LEGISLATIF
DARI SETIAP PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
DI KABUPATEN DT II KUNINGAN

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	DCS*	DCT**
1.	Partai Indonesia Baru (PIB)	9	9
2.	Partai Kristen Nasional (Krisna)	4	4
3.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	20	19
4.	Partai Aliansi Demokrat Indonesia (PADI)	-	-
5.	Partai Kebangkitan Muslim Indonesia (KAMI)	1	1
6.	Partai Ummat Islam (PUI)	2	2
7.	Partai Kebangkitan Ummat (PKU)	7	8
8.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	48	45
9.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	72	74
10.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII-1905)	32	32
11.	Partai Amanat Nasional (PAN)	9	8
12.	Partai Bulan Bintang (PBB)	5	5
13.	Partai Pilihan Rakyat (PILAR)	25	25
14.	Partai Keadilan (PK)	29	28
15.	Partai Nahdatul Ummat (PNU)	2	2
16.	PNI Front Marhaen (PNI-FM)	7	7
17.	Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	7	7
18.	Partai Republik (PR)	1	1
19.	Partai Islam Demokrat (PID)	15	15
20.	Partai Musyawarah Rakyat Banyak (MUBA)	-	-
21.	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)	2	2
22.	Partai Golongan Karya (Golkar)	4	4
23.	Partai Persatuan (PP)	80	79
24.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4	4
25.	Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI)	39	38
26.	Partai Daulat Rakyat (PDR)	2	2
27.	Partai Bhineka Tunggal Ika (PBI)	1	1
28.	Partai Nasional Bangsa Indonesia (PNBI)	11	11
29.	Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI)	5	5
30.	Partai Nasional Demokrat (PND)	2	2
31.	PNI Masa Marhaen (PNI-MM)	4	4
32.	Partai Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)	2	2
33.	Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)	-	-

34.	Partai Ummat Muslimin Indonesia (PUMI)	-	-
35.	Partai Pekerja Indonesia (PPI)	3	3
	JUMLAH	454	451

Keterangan :

DCS* = Daftar Calon Sementara

DCT** = Daftar Calon Tetap

Sumber PPD II Kabupaten Kuningan.

Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, Pemilu 1999 terlihat lebih semarak. Partai-partai peserta pemilu cukup antusias dalam mempersiapkan masa kampanye, terlebih lagi dua partai peserta pemilu sebelumnya, yakni: PDI (PDI-P) dan PPP, kelihatan lebih mencolok dibandingkan dengan partai lainnya. Pos-pos PDI-P didirikan di hampir setiap blok/ dusun yang ada di kota Kuningan, begitu pula pos-pos PPP cukup banyak didirikan walaupun tidak sebanyak pos-pos PDI-P. Partai-partai baru, seperti PAN, PKB, PBB, dan PK juga terlihat lebih menonjol dibandingkan dengan partai-partai baru lainnya. Poster, spanduk, bendera, dan umbul-umbul yang bercirikan partai banyak dipasang di setiap penjuru kota dan juga di beberapa daerah lainnya, telah menambah semakin semaraknya suasana Pemilu 1999 di Kuningan. Hal yang cukup menonjol lainnya adalah aktivitas Partai Golkar yang kelihatannya lebih menurun dan tidak se'ekspose' seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya. Hanya terlihat beberapa poster, spanduk, dan bendera dipasang tetapi tidak semeriah dan sebanyak ketika pemilu sebelumnya.

Pelaksanaan kampanye yang diduga dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, pada kenyataannya tidak terjadi di Kuningan. Memang benar, telah terjadi

beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh partai-partai politik, tetapi pelanggaran itu tidak langsung berkaitan dengan penentuan pilihan para pemilih, kecuali ada beberapa kasus dugaan “politik uang” yang dilakukan Partai Golkar, misalnya: dengan membagi-bagikan sejumlah uang para khalayak pemilih tertentu. Pelanggaran yang terjadi ketika masa kampanye pada dasarnya merupakan pelanggaran yang diakibatkan oleh masih kurangnya kesadaran hukum dan kesadaran politik, baik pada masyarakat umum dan para elit partai politik yang berkenaan dengan prosedur hukum pelaksanaan kampanye (pemberitahuan jadwal kampanye, STTP dari Polri sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 Keputusan KPU Nomor 13 Tahun 1999), penghinaan dan pengrusakan terhadap atribut partai lain, penggunaan jalan/ sarana umum (arak-arakan di jalan umum yang mengakibatkan masyarakat pengguna jalan terganggu) dan sebagainya. Pihak yang menjadi objek dalam penyelewengan yang berkaitan dengan penghinaan, pengrusakan, dan pencopotan atribut partai adalah Partai Golkar. Hal ini erat berkaitan dengan perilaku politik Partai Golkar di masa lalu yang dinilai banyak kalangan melakukan kecurangan, baik melalui intimidasi maupun mobilisasi. Kejadian yang mengkhawatirkan terjadi takala massa Partai Golkar berkampanye pada putaran kedua di hari terakhir, dicemoohi, dilempari, dihadang, dan diberhentikan mobilnya oleh sekelompok massa lain yang tidak beratribut serta kemudian para penumpangnya dilucuti kaosnya sehingga tidak sedikit kaum hawa (perempuan) yang berlarian mencari tempat perlindungan sambil menutupi sebagian tubuhnya yang terbuka. Kejadian ini tidak

hanya telah melanggar hukum, tetapi juga telah melanggar etika kesopanan masyarakat.

Hal lain yang terjadi pada saat kampanye adalah adanya beberapa partai politik peserta pemilu yang tidak melakukan kampanye. Walaupun secara hukum tidak berarti menyalahi aturan, namun secara moral partai-partai tersebut mengabaikan misi pendidikan politik, apalagi partai-partai tersebut memperoleh bantuan dana dari pemerintah daerah. Partai politik yang tidak melaksanakan kampanye itu adalah KAMI, SUNI, PIB, PPI, PNI-MM, SPSI, MURBA, KRISNA, PADI, PNI-FM, PUI, PUMI, PILAR, dan Partai Persatuan.

Pemilu di Kuningan, pada saat pemungutan dan penghitungan suara, juga berjalan lancar. Rabu, 7 Juli 1999, situasi Kota Kuningan yang peneliti pantau dengan berkeliling menggunakan sepeda gunung dirasakan cukup kondusif. Pagi itu jalanan terasa sepi sekali, pasar tradisional yang biasanya ramai saat itu sepi, hanya petugas kebersihan yang terlihat sedang menyapu dan mengangkut sampah. Suasana mulai ramai ketika jam menunjukkan sekitar pukul 07.00 pagi, para petugas TPS terlihat sedang membereskan kursi-kursi dan segala peralatan bagi kepentingan pemungutan suara, tak terkecuali daftar calon legislatif dari berbagai partai politik pun sudah terlihat dipajang. Sementara itu, warga yang lain pun mulai terlihat berombongan berjalan menuju TPSnya masing-masing. Ada yang langsung duduk, ada pula yang melihat-lihat, membaca, dan membuka-buka lembaran daftar calon legislatif yang memang dipajang.

Pelaksanaan pemungutan suara, yang peneliti pantau, terlihat cukup lancar di beberapa TPS. Pelaksanaanya selesai kira-kira pukul 12.00. Setelah itu dilakukan penghitungan dan pengecekan terhadap kartu suara, baik dari jumlah maupun keabsahannya. Hal yang paling membedakan dengan pemilu sebelumnya terlihat jelas tatkala penghitungan suara dimulai. Masyarakat pemilih terlihat sangat antusias, mereka mengikuti penghitungan suara dengan sukacita, sambil sekali-sekali meneriakan yel-yel kemenangan dan gurauan. Lagi-lagi Partai Golkar menjadi bahan olok-olokan oleh sebagian para pemilih yang menyaksikan penghitungan suara. Peristiwa seperti ini tidak terjadi pada pemilu-pemilu yang telah lalu, dimana jarang sekali masyarakat pemilih yang mengikuti penghitungan suara apalagi dalam waktu yang cukup lama. Rata-rata penghitungan suara di TPS-TPS baru selesai menjelang saat Maghrib dan di sebagian TPS bahkan sampai malam hari.

Hasil akhir penghitungan suara menunjukkan bahwa suara yang sah yang masuk ke PPD II, khususnya untuk DPRD II adalah 537.622 buah. Jadi ada suara yang tidak sah sampai 65.976 buah (pemilih yang terdaftar 603.598 orang - suara yang sah 537.622). Berdasarkan penghitungan sesuai dengan pasal 67 UU Nomor 3 Tahun 1999 dan penghitungan sisa suara, kursi yang diperoleh parpol untuk DPRD II sebagai berikut :

TABEL 5
PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PADA PEMILU TAHUN 1999

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA*	PEROLEHAN KURSI**
1.	PDI Perjuangan (PDIP)	223.139	17
2.	Partai Golkar (Golkar)	102.179	8
3.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	86.505	7
4.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	39.497	3
5.	Partai Amanat Nasional (PAN)	31.011	3
6.	Partai Bulan Bintang (PBB)	13.681	1
7.	Partai Keadilan (PK)	11.501	1
	JUMLAH		40

Keterangan:

* Perolehan suara untuk DPDR II.

** Perolehan kursi terakhir setelah ditambah hasil *stembus accoord*.

Sumber : PPD II Kabupaten Kuningan.

Hal lain yang perlu dikemukakan di sini yang berkenaan dengan pelaksanaan pemilu di Kuningan adalah adanya dugaan tentang penyelewengan dana pemilu. Beberapa pihak yang peneliti hubungi mengungkapkan bahwa penggunaan dana pemilu di Kuningan tidak transparan, khususnya yang dilakukan oleh Kepala Sekretariat PPD II, dalam hal ini Kepala Direktorat Sosial Politik Kabupaten Kuningan. Beberapa sumber mengatakan bahwa penyelewengan dana pemilu tersebut mencapai angka 1.2 milyar rupiah. Sampai penelitian ini dilaporkan, kasus penyelewengan tersebut belum juga usai. Tindakan nyata yang terlihat dilakukan oleh pihak pemerintah daerah adalah penggantian kepala ditsospol dan mengembalikan kaditsospol lama ke kesatuannya di Bandung.

B. Data Hasil Penelitian

Data hasil penelitian ini dibagi ke dalam dua kategori, yaitu data yang berasal dari kuesioner yang diisi responden dan data/ informasi yang berasal dari hasil wawancara langsung antara peneliti dengan responden.

I. Data Penelitian Berasal dari Kuesioner²⁴

Data hasil penelitian yang berasal dari pengisian kuesioner oleh para responden ini akan disajikan dalam 4 bagian, yaitu: identitas responden, pilihan responden pada Pemilu 1997 dan Pemilu 1999, pertimbangan pilihan responden pada Pemilu 1999, dan sumber informasi responden tentang partai politik.

a. Identitas Responden

Identitas responden ini menggambarkan data tentang identitas diri, tempat tinggal, pendapatan, dan tingkat pendidikan serta aktivitas sosial-politik dan profesi. Secara rinci identitas responden dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Usia responden di bawah 30 tahun tidak ada (0%), antara 30 - 45 tahun sebanyak 49 orang (40.83%), dan di atas 45 tahun sebanyak 71 orang (59.17%).

Jenis kelamin responden terdiri atas 38 orang (31.67%) perempuan dan 82 orang (68.33%) laki-laki.

²⁴ Sebagai gambaran ringkas tentang data penelitian yang berasal dari kuesioner tersebut dapat dilihat dari rekapitulasi yang tertera pada lampiran.

Agama yang dianut responden adalah Islam sebanyak 119 orang (99.17%), Kristen Katolik satu orang (0.83%), Kristen Protestan, Budha, dan Hindu tidak ada.

Jenjang sekolah tempat mengajar responden adalah SD sebanyak 53 orang (44.17%), MI 15 orang (12.5%), SMP 27 orang (22.5%), MTs 12 orang (10.0%), SMU 13 orang (10.83%), dan MA tidak ada.

Lamanya responden telah bekerja menjadi guru adalah kurang dari 5 tahun sebanyak 14 orang (11.67%), antara 5 sampai 10 tahun sebanyak 62 orang (51.67%), dan diatas 10 tahun sebanyak 44 orang (36.66%).

Tempat tinggal responden terdiri atas: di kampung sebanyak 20 orang (16.67%), di desa sebanyak 63 orang (52.5%), di kota kecamatan sebanyak 27 orang (22.5%), dan di kota kabupaten sebanyak 10 orang (8.33%).

Gaji yang diterima responden per bulan adalah kurang dari 300 ribu sebanyak 3 orang (2.5%), antara 300 - 600 ribu sebanyak 99 orang (82.5%), antara 600 ribu - satu juta sebanyak 18 orang (15.0%), dan di atas satu juta rupiah tidak ada. Sedangkan penghasilan per bulan di luar gaji (yang menjawab ada 64 orang) adalah kurang dari 300 ribu sebanyak 36 orang (30.0%), antara 300 - 600 ribu sebanyak 26 orang (21.67%), antara 600 ribu - satu juta sebanyak 13 orang (11.11%), dan di atas satu juta sebanyak 2 orang (1.67%).

Tingkat pendidikan responden terdiri atas setingkat SLTA sebanyak 18 orang (15.0%), diploma (1,2,3) sebanyak 67 orang (55.83%), dan sarjana strata satu sebanyak 35 orang (29.17%).

Aktivitas responden dalam organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dapat digambarkan sebagai berikut: responden yang aktif dalam organisasi kemasyarakatan (RT, RW, Desa/LKMD) sebanyak 47 orang (39.17%), Karang Taruna sebanyak 27 orang (22.5%), PKK/Pos Yandu sebanyak 28 orang (23.33%), dan organisasi keagamaan (DKM dan sejenisnya) sebanyak 23 orang (19.17%). Jadi, aktivitas responden pada organisasi sosial-keagamaan adalah responden yang aktif sebanyak 93 orang (77.5%) dan tidak aktif sebanyak 27 orang (22.5%).

Aktivitas responden dalam organisasi politik dapat digambarkan sebagai berikut: pada Pemilu 1997 dan sebelumnya sebanyak 79 orang (65.83%), pada tahun 1998 atau sebelum UU yang mengatur PNS dalam pemilu diberlakukan sebanyak 68 orang (56.67%), dan setelah UU diberlakukan tidak ada secara formal atau mengundurkan diri. Jadi, responden yang pernah aktif dalam organisasi partai politik sebanyak 82 orang (68.33%) dan yang tidak pernah aktif sebanyak 38 orang (31.67%).

Aktivitas responden dalam organisasi profesi dapat dipaparkan sebagai berikut: sebagai anggota PGRI sebanyak 91 orang (75.83%), sebagai pengurus PGRI tidak ada, anggota ISPI tidak ada, sebagai pengurus ISPI sebanyak 2 orang (1.67%). Jadi, responden yang termasuk aktif (sebagai anggota dan pengurus) sebanyak 91 orang (77.5%) dan yang tidak menjadi anggota/ pengurus sebanyak 27 orang (22.5%).

b. Pilihan Responden pada Pemilu 1997 dan Pemilu 1999

Responden yang memilih Golongan Karya (Golkar) pada Pemilu 1997 sebanyak 107 orang (89.17%) dan yang tidak memilih Golkar sebanyak 13 orang (10.83%).

Aspek-aspek yang dipertimbangkan responden dalam memilih Golkar pada Pemilu 1997 adalah : loyalitas sebagai PNS sebanyak 86 orang (71.67%), karena atas anjuran atasan sebanyak 48 orang (40.0%), sesuai dengan aspirasi pribadi sebanyak 58 orang (48.33%), dan alasan keluarga sebanyak 23 orang (19.17%).

Pilihan responden pada Pemilu 1999 adalah yang tetap memilih Golkar (Partai Golkar) sebanyak 51 orang (42.5%) dan memilih partai lain sebanyak 69 orang (57.5%) dengan rincian 28 orang memilih Partai Amanat Nasional (23.33%), 15 orang memilih Partai Persatuan Pembangunan (12.5%), 13 orang memilih Partai Bulan Bintang (10.83%), 5 orang memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (4.17%), 4 orang memilih Partai Kebangkitan Bangsa (3.33%), 3 orang memilih Partai Keadilan (2.5%), dan 1 orang memilih PSII 1905 (1.7%). Dari 69 orang yang tidak memilih Partai Golkar pada Pemilu 1999 ini ada 13 orang yang pada Pemilu 1997 tidak memilih Golkar. Jadi, kalau diambil 13 orang tersebut, ada 56 orang yang memilih Golkar pada Pemilu 1997 dan tidak memilih Partai Golkar pada Pemilu 1999.

Pilihan responden untuk DPRD Pusat, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II pada umumnya relatif sama, mereka memilih partai yang sama kecuali 20 orang

(17.09%) responden yang memilih partai yang berbeda untuk ketiga jenis pilihan anggota dewan tersebut.

Selain partai yang dipilih, responden juga menyukai partai lain yang dapat digambarkan sebagai berikut: 60 orang (50.0%) menyukai PBB, 50 orang (41.67%) PPP, 36 orang (30.0%) PK, 34 orang (28.3%) PKB, 33 orang (27.5%) PAN, 14 orang (11.67%) PDIP, dan 3 orang (2.5%) menyukai Partai Golkar.

c. Pertimbangan Pilihan Responden pada Pemilu 1999

Ketika responden ditanya tentang hal-hal apa saja yang dipertimbangkan dalam memilih partai politik pada Pemilu 1999, mereka yang memilih didasarkan pada : kehendak sendiri/ aspirasi pribadi, bukan anjuran atau paksaan pihak lain sebanyak 119 orang (99.16%), keaspiratifan partai dalam memperjuangkan aspirasi para guru/ responden sebanyak 102 orang (85.0%), perkiraan kemampuan partai dalam pengelolaan negara yang lebih baik sebanyak 101 orang (84.17%), informasi tentang program-program yang diajukan partai sebanyak 100 orang (83.33%), informasi tentang figur ketua umum partai sebanyak 91 orang (75.83%), informasi tentang calon-calon anggota legislatif yang diajukan partai, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sebanyak 87 orang (72.5%), dan calon presiden yang diusulkan partai sebanyak 76 orang (63.33%), serta resiko yang paling aman jika memilih partai yang lain sebanyak 74 orang (61.67%).

d. Sumber Informasi Responden

Tatkala ditanyakan tentang dari sumber informasi apa sajakah responden mengetahui berbagai hal tentang partai-partai politik yang dipilih dalam Pemilu 1999, mereka menjawab sebagai berikut : siaran televisi sebanyak 117 orang (97.5%), surat kabar, majalah, dan tabloib sebanyak 112 orang (93.33%), siaran radio sebanyak 83 orang (69.17%), rekan sejawat sebanyak 78 orang (65.0%), keluarga (suami/istri) sebanyak 49 orang (40.83%), kampanye langsung (di lapangan/ gedung pertemuan) sebanyak 37 orang (30.83%), dan aktivis partai politik sebanyak 36 orang (30.0%) serta atasan di kantor/ tempat bekerja sebanyak 33 orang (27.5%).

Dari sekian banyak sumber informasi tersebut, responden memilih siaran televisi sebagai sumber informasi yang lebih dominan dalam menentukan partai politik yang dipilih dalam pemilu, yaitu sebanyak 102 orang (85.0%). Sedangkan responden lainnya memilih surat kabat, majalah, dan tabloid sebanyak 10 orang (8.33%), keluarga (suami/istri) sebanyak 3 orang (2.5%), atasan di kantor sebanyak 2 orang (1.67%) dan kampanye langsung sebanyak 2 orang (1.67%) serta aktivis partai sebanyak 1 orang (0.83%) dan tidak ada yang menjawab radio sebagai informasi yang dominan.

2. Data Penelitian Berasal dari Wawancara²⁵

Ada tiga karakteristik responden yang diwawancarai dalam penelitian ini, yaitu: Pertama responden yang perilaku memilihnya tetap, yakni memilih Golkar/ Partai Golkar, baik pada Pemilu 1997 maupun Pemilu 1999. Kedua, responden yang perilaku memilihnya berubah, yakni memilih Golkar pada Pemilu 1997 tetapi memilih partai lain selain Partai Golkar pada Pemilu 1999. Dan terakhir, responden yang tidak memilih Golkar/ Partai Golkar, baik pada Pemilu 1997 maupun Pemilu 1999.

a. Karakteristik pertama, yaitu responden yang pada Pemilu 1997 dan Pemilu 1999 tetap memilih Golkar/ Partai Golkar.

(1) Hasil Wawancara dengan Sdr. SLH, Guru SD.

Dalam pemilu 1999 kemarin itu Bapak melakukan suatu pilihan, nah pertimbangan-pertimbangan apa yang Bapak kriteriakan dalam memilih partai politik tersebut?

Pertama, pertimbangan pertama karena saya...eu... dulu aktif sebagai komdes Golkar. Terus yang kedua, melihat dari beberapa program yang diajukan oleh Golkar Baru, partai sekarang ini, partai reformis, dan juga ...eu... melihat platform yang ada di bawah kepemimpinan Akbar Tanjung bahwa Golkar mempunyai visi yang jelas...eu...masa depan.

²⁵ Untuk membedakan pertanyaan wawancara dengan jawaban responden, penulisannya dibedakan; huruf tegak pertanyaannya dan huruf italic jawabannya. Hasil wawancara ini dipaparkan sebagaimana

Apakah ada pertimbangan lain?

Ya.....karena dari dulu saya mulai aktif di partai politik praktis merasakan bahwa Golkar ini secara administratif atau suatu partai, yang istilahnya, bisa memberikan suatu kontribusi bagi karir saya begitu.

Yang kedua, sudah merasa mendarahdaging begitu, dengan kehidupan di parpol tersebut.

Kalau Pemilu'99 diulang, kira-kira Bapak mau memilih apa?

Tetap saya memilih Golkar dengan di bawah kepemimpinan Akbar Tanjung.

Kalau pemimpinnya berubah?

Dilihat dari platform dan visinya yang...yang apakah sesuai.

Kalau platform tetap, tetapi pemimpinnya berubah, kira-kira akan tetap?

Bisa.....bisa lihat ini sit.....lihat program yang diajukan oleh...oleh figur pemimpin itu.

Jadi, kalau pemimpinnya berubah bisa jadi pilihannya berubah?

Tapi, maaf. Kalau saya memilih partai itu bukan...bukan secara egoistis cuman hanya mementingkan diri sendiri, tapi melihat kepentingan umum, bangsa dan negara.

Saya tanya lagi, kalau Golkar pada pemilu kemarin itu tidak ada, kira-kira

Bapak mau memilih apa?

Yang...yang balance, seimbang dengan program Golkar yaitu Pan, sebagai partai intelektual. Saya sebetulnya ada keraguan antara Golkar dan PAN,

adanya jawaban/perkataan dari para responden bukan hasil konstruksi dari peneliti.

maaf, mana yang lebih cocok dengan saya. Tapi karena bahwa dari dulu saya merasakan nikmatnya di Golkar, makanya saya tetap di Golkar. Tidak akan berubah.

Kenapa ngak ke PDI? PDI juga kan partai terbuka.

Eu.....maaf ya, saya jauh-jauh dari pembicaraan saya untuk merendahkan PDI. Saya bukan apriori terhadap partai itu, walaupun dianggap partai nasionalis, tapi partai tersebut sekuler begitu, lalu banyak memisahkan kekuasaan dengan Mega.

Beralih ke pemilu 1997. Pada Pemilu 1997 itu PNS seakan diwajibkan memilih Golkar. Ada tiga pertimbangan seorang guru itu memilih Golkar, yaitu: Pertama, karena anjuran atasan berupa tekanan yang sifatnya struktural dari atasan. Kedua, karena loyalitas sebagai PNS, yang artinya PNS itu harus loyal kepada pemerintah dengan kata lain harus memilih Golkar. Ketiga, aspirasi sendiri.

Bagaimana pendapat Bapak terhadap pernyataan ini?

Eu...sebenarnya pada Pemilu 1997 saya juga sudah merasa komit terhadap partai tersebut, Golkar begitu. Sebenarnya saya...saya memilih partai Golkar itu karena eu...adanya aspirasi pribadi, kebetulan ada pressure dari secara birokratis yang ada tekanan yang.....

Pressure itu berupa apa?

Tekanan bahwa maksudnya pressure, tekanan yang berasal dari atasan begitu supaya memilih Golkar. Kepala sekolah juga atau secara organisasi dari PGRI juga ikut terlibat dalam urusan partai misalnya.

Jadi, bahwa kita punya satu komitmen begitu terhadap partai Golkar untuk mensukseskan pemilu.

Terima kasih, Pak.

(2) Hasil Wawancara dengan Sdri. NN, Guru SD.

Ibu mengajar di mana, di SD?

Ya....

Dalam pemilu 1999 kemarin, Ibu memilih suatu partai dalam pemilu. Dalam menentukan pilihan itu, faktor-faktor apa saja yang Ibu pertimbangkan?

Pilihan saya, yang pertama....terus terang saya memilih Golkar.

Yang kemarin karena mungkin saya sejak pemilu pertama itu sudah menjadi PNS, sehingga suka diarahkan harus memilih itu dan kemarin juga saya memilih itu terus.

Apakah pilihan itu karena ada rasa kewajiban untuk memilih partai itu (Golkar)?

Yang kemarin mungkin tidak, mungkin juga iya, bisa iya bisa tidak gitu.

Jadi, mungkin sudah mendarah daging itu istilahnya. Jadi, saya itu sulit, agak sulit, mungkin saya juga punya pilihan yang lain ingin..tetapi rasa loyalitas

saya kepada pemerintah sebagai pegawai negeri terus...saya lihat juga program-programnya, sekarang lain dengan yang kemarin, saya lihat.

Calegnya?

Calegnya yang ada lain, ada yang berbeda. Itu juga seperti memperhatikan nasib guru untuk yang sekarang programnya.

Beralih ke pemilu 1997. Pada Pemilu 1997 itu PNS seakan diwajibkan memilih Golkar. Ada berbagai pertimbangan seorang guru itu memilih Golkar, yaitu: Pertama, karena anjuran atasan berupa tekanan yang sifatnya struktural dari atasan. Kedua, karena loyalitas sebagai PNS, yang artinya PNS itu harus loyal kepada pemerintah dengan kata lain harus memilih Golkar. Ketiga, aspirasi sendiri.

Bagaimana pendapat Ibu terhadap pernyataan ini?

Ya....kalau tekanan pasti karena saya guru SD, selalu ditekan istilahnya dalam pemilu. Loyalitas mungkin iya juga karena saya pegawai negeri, karena pimpinan karena ada ketakutan kalau tidak milih itu sanksinya mutasi gitu istilahnya.

- b. Karakteristik kedua, yaitu responden yang pada Pemilu 1997 memilih Golkar, tetapi pada Pemilu 1999 tidak memilih Partai Golkar.**

(1) Hasil Wawancara dengan Sdr. IR, Guru SD.

Ibu kelihatannya sudah cukup lama menjadi guru. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Ibu mengajar?

Oh..iya, saya mengajar di SD sudah cukup lama, eu....kira-kira hampir 25 tahun. Tapi saya dulu menjadi tenaga honorer dulu. Jadi, kalau dihitung dari TMT PNSnya sich, kira-kira 22 tahunan saya jadi guru negeri.

Kalau Ibu tidak keberatan, saya mau bertanya sesuatu yang berkaitan dengan pemilu?

Boleh saja, masa sich keberatan. Kalau saya tahu ya....insya Allah akan saya jawab.

Begitu Bu, pada Pemilu'99 yang baru berlalu, Ibu memilih suatu partai dalam pemilu. Dalam menentukan pilihan itu, faktor-faktor apa saja yang Ibu pertimbangan?

Oh....itu. Waktu Pemilu kemarin saya memang memilih partai yang berbeda dengan partai yang saya pilih pada Pemilu 1997. Saya pikir semua juga tahu bahwa pemilu yang kema'ini itu suasananya berbeda, sangat berbeda dengan pemilu yang lalu-lalu. Yang sangat membedakan bagi kami, para pegawai negeri, adalah kebebasan dalam memilih partai, tidak ada anjuran-anjuran atau bahkan paksaan untuk memilih salah satu partai tertentu seperti pemilu-pemilu yang telah lalu.Jadi, ini kesempatan bagi saya khususnya untuk memilih sesuai dengan kehendak nurani sendiri. Berbeda dengan dulu, dulu mah ditekan-tekan.....harus memilih anu.

Nah, berkaitan dengan pertimbangan apa yang saya pertimbangkan dalam memilih itu adalah; pertama, karena ada kebebasan itu, bahkan ada undang-undangnya. Saya memilih partai itu yang menurut saya dapat

memperjuangkan aspirasi saya sebagai guru dan sebagai muslim. Kedua, saya bandingkan program-programnya, khususnya yang saya tonton di televisi, kampanye partai-partai. Terus calon presidennya dan figur pimpinan partainya yang menurut perkiraan saya cocok untuk membawa bangsa ini keluar dari krisis yang kita alami. Saya rasa itu pertimbangannya.

Apakah Ibu juga memilih partai yang berazaskan Islam? Ibu kan seorang muslim.

Iya..betul, tapi bukan itu maksud saya. Saya bukan eu... memilih begitu. Saya milih partai yang visi dan programnya jelas, pemimpinnya patut dicontoh. Memang benar, banyak partai yang memakai bendera Islam, tapi pilihan saya bukan hanya karena itu. Partai Islam kan tidak berarti Islami. Kan...banyak orang memakai nama Islam, tapi hanya untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk Islam dan umatnya.

Baiklah, beralih ke pemilu 1997. Pada Pemilu 1997 itu PNS seakan diwajibkan memilih Golkar. Ada berbagai pertimbangan seorang guru itu memilih Golkar, yaitu: Pertama, karena anjuran atasan berupa tekanan yang sifatnya struktural dari atasan. Kedua, karena loyalitas sebagai PNS, yang artinya PNS itu harus loyal kepada pemerintah dengan kata lain harus memilih Golkar. Ketiga, aspirasi sendiri.

Bagaimana pendapat Ibu terhadap pernyataan ini?

Kalau mikirin pemilu yang dulu, kayaknya kita-kita ini dibohongi demi pembangunan. Jangankan masalah milih partai yang memang selalu ditekan-



tekan. Masuk KB saja kita-kita ini diwajibkan. Dulu, ketika KB mulai diberlakukan, saya sebagai guru harus mengajak masyarakat di sekitar saya untuk ber-KB, jadi bukan hanya saya saja, bahkan harus ditulis segala. Ini persis seperti program Dasagal dulu, kita pegawai negeri ini harus menuliskan paling sedikit 10 orang sebagai kader. Kalau saya sich, ya...saya catat saja, entah dia pilih itu atau tidak, yang penting ada catatannya.

Jadi, memang benar kalau pertimbangan guru itu seperti itu. Yang sangat menentukan, saya rasa anjuran atau bahkan tekanan dari atasan kita, karena ada kaitannya dengan hal-hal lainnya. Kita kan takut kalau tidak memilih yang itu ada apa-apanya.

Terima kasih, Bu.

Sama-sama.

(2) Hasil Wawancara dengan Sdr. JHD, Guru SD.

Dalam pemilu 1999 kemarin, Bapak memilih suatu partai dalam pemilu. Dalam menentukan pilihan itu, faktor-faktor apa saja yang Bapak pertimbangan?

Pemilu tahun'99 terdiri dari banyak partai dan saya kebetulan sebagai pegawai negeri dan ada di daerah pedesaan di sana.

Kebetulan dan merasa eu... bangga juga sebagai pegawai negeri di desa tidak diikutsertakan kepada kepengurusan dalam pemilihan umum tersebut.

...Kemudian di dalam pelaksanaan pemilihan, saya tetap berkonsensus dan memilih, menilai dari sekian partai dari hasil kampanye. Nah...dilihat dari eu... penawaran-penawaran dari kampanye tersebut saya memilih salah satu partai yang dianggap cocok berdasarkan hati nurani saya demi kemajuan bangsa dan negara, khususnya bagi kami pegawai negeri yang ada di pedesaan.

Selanjutnya bahwa pemilu'99 di sana di kami, khususnya di daerah itu kebetulan banyak sekali masyarakat yang eu... ingin memilih itu ke salah satu partai yang dianggap baik menurut mereka pada waktu dulu, tapi tetap saya berpendirian kepada hati nurani saya sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan, yaitu keberhasilan partai, kepemimpinannya, tujuan apa yang akan dicapai nanti pada bangsa dan negara. Terima kasih.

Jadi, lebih dituju pada program-program yang dianggap baik atau tidak?

Ya..., jadi saya melihat program-program yang diusulkan partai kepada masyarakat melalui kampanye, kampanye langsung.

Beralih ke pemilu 1997. Pada Pemilu 1997 itu PNS seakan diwajibkan memilih Golkar. Ada berbagai pertimbangan seorang guru itu memilih Golkar, antara lain: Pertama, karena anjuran atasan berupa tekanan yang sifatnya struktural dari atasan. Kedua, karena loyalitas sebagai PNS, yang artinya PNS itu harus loyal kepada pemerintah dengan kata lain harus memilih Golkar. Ketiga, aspirasi sendiri.

Bagaimana pendapat Bapak terhadap pernyataan ini?

Pada pemilu '97 kebetulan masih tiga partai, yaitu: Golkar, P3, dan PDI. Nah, pada waktu dulu saya khususnya sebagai pegawai negeri bahkan rakyat sendiri pun...ini khususnya bagi kami pegawai negeri itu memang pada waktu dulu itu ada yang begitulah kira-kira. Pada tahun '97 ke belakang pada masa Orde Baru itu memang bagi pegawai negeri itu ada, barangkali sudah tidak bisa dirahasiakan kembali, itu ada penekanan-penekanan harus memilih salah satu partai karena eu... waktu dulu memang yang sedang berkoar atau yang sedang berkembang itu adalah Golkar. Namun pribadi saya pada waktu dulu memang banyak pertimbangan, karena saya selaku pegawai negeri, juga karena saya taat kepada pimpinan dan atasan, kemudian daripada hal yang lain. Namun secara eu... batiniyah sebenarnya saya pribadi pun beserta keluarga tidak cocok dengan kata-kata yang diharus-haruskan itu. Keinginannya itu seperti sekarang saja bebas memilih, tidak ada paksaan atau penekanan-penekanan dari utamanya dari atasan bagi para pegawai negeri. Barangkali itu yang dapat saya jelaskan.

c. Karakteristik ketiga, yaitu responden yang pada Pemilu 1997 dan Pemilu 1999 tidak memilih Golkar/ Partai Golkar.

(1) Hasil Wawancara dengan Sdr. IMS, Guru SMP.

Ibu..eu... ngajar di mana, Bu?

Saya ngajar di SMP.

Saya mau tanya tentang Pemilu yang kemarin. Waktu Pemilu yang kemarin itu Ibu kan melakukan pilihan terhadap parpol, eu... Apa kriteria Ibu dalam mempertimbangkan pilihan tersebut?

Eu...., untuk saya sendiri, kriteria pertama yang saya ambil itu saya lihat partai yang punya komitmen terhadap Islam itu kriteria saya. Kemudian juga memiliki tujuan yang jelas dan mempunyai pemimpin yang secara intelektual juga baik begitu.

Apakah partai itu harus partai Islam?

Eu, saya tidak terpaku bahwa partai itu harus partai Islam tapi yang jelas apapun meskipun itu tidak berasaskan Islam yang penting komitmennya terhadap Islam itu ada dan tinggi gitu

Apakah selain kriteria tadi ibu juga ada kriteria lain yang mungkin dipertimbangkan dalam memilih kemarin?

Ya, diantaranya kita lihat pemimpinnya, orang-orang yang ada di sekitarnya, kemudian juga wakil-wakil rakyat yang apa...wakil-wakil yang mewakili.... dicalonkan.

Apakah ada pertimbangan yang sifatnya birokratis?

Eu.. tidak ada yang..tidak ada.

Kepala sekolah menganjurkan apa?

Tidak ada.

Suami?

Tidak ada.

Dengan orang tua juga dengan tetangga juga, didalam satu keluarga juga berbeda-beda.

Beralih ke pemilu 1997. Pada Pemilu 1997 itu PNS seakan diwajibkan memilih Golkar. Ada berbagai pertimbangan seorang guru itu memilih Golkar, antara lain: Pertama, karena anjuran atasan berupa tekanan yang sifatnya struktural dari atasan. Kedua, karena loyalitas sebagai PNS, yang artinya PNS itu harus loyal kepada pemerintah dengan kata lain harus memilih Golkar. Ketiga, aspirasi sendiri.

Bagaimana pendapat Ibu terhadap pernyataan ini?

Menurut pendapat saya? Bagi saya pribadi terus terang saya tidak suka dengan tekanan seperti itu. Meskipun secara struktural loyalitas itu tidak berarti harus rame-rame pilih satu partai yang dianjurkan kepada sekolah misalnya. Dan sejujurnya pada Pemilu'97 mungkin saya bisa dikatakan memilih bisa juga dikatakan tidak memilih. Mengapa demikian? ya...karena tiga-tiganya saya pilih.....(ketawa). Mungkin karena anjuran saya pilih itu, karena keinginan pribadi saya pilih itu, dan untuk eu...pertimbangan saya keadilan yang saya pilih tiga-tiganya.....(ketawa).

Ada tekanan?

Ya.....memang ada dan mungkin cara saya memilih itu wujud dari protes saya terhadap tekanan itu.

(2) Hasil Wawancara dengan Sdr. AM, Guru SMK.

Saya ingin mengetahui aktivitas atau latar belakang Bapak di partai politik.

Bisa Bapak menjelaskannya?

Kalau secara resmi barangkali tidak tercantum karena waktu itu kan seperti kita ketahui ya... tidak boleh kan.

Saya sebagai PNS kan waktu itu kan sangat dilarang, diintimidasi, ditekan... tidak boleh sama sekali, kecuali aktif di Golkar saja.

Cuma secara pribadi... ya boleh kan... terus terang saja, sejak dari dulu saya belum pernah saya mencoblos Golkar. Mengapa? ya... karena saya pikir yang saya pelajari bahwa Golkar ini sangat tidak tindakannya lalu gerakan-gerakannya... lalu cara-caranya mencari pendukung, mencari anggota itu sangat tidak simpatik. Yang sebetulnya seolah-olah kami ini ditekan gitu, dipaksa gitu.

Bapak pernah jadi anggota Golkar?

Aa.... pernah, kartunya punya, karena waktu itu kan dipaksa semua. Jadi, ya... katakanlah dalama bahasa Sundanya disebut "ditulis tonggong" gitulah, walaupun pegawai negeri tidak tahu menahu, tahu-tahu keluar saja yang istilahnya NPAG (Nomor Pokok Anggota Golkar, sehingga ya... barangkali kasarnya disebut itu.

Kami ini apa namanya "ditulis tonggong", tidak tahu menahu, cuma se... selama itu saya pribadi tidak pernah aktif tidak pernah berbuat apa-apa untuk mereka, tapi jiwa saya tetap pada partai politik gitu.

Jadi Bapak ikut aktif di partai politik?

Ikut, tapi tidak terang-terangan, hanya sembunyi-sembunyi saja, walaupun semua tahu ada beberapa orang langsung masuk ke PDI atau P3, ke Golkar semua orang tahu ngak ada masalah kan. Kalau mau langsung terjun ke Golkar mah mulus-mulus saja. Perjalanan ke politik, ke P3 dan PDI, waktu itu kan cuma tiga saja, itu dipersulit.

Ketika banyak muncul partai politik sebelum pemilu'99, Bapak juga ikut aktif?

Saya aktif. Saya menjadi sekretaris DPD.....

Beralih ke pemilu 1997. Pada Pemilu 1997 itu PNS seakan diwajibkan memilih Golkar. Ada berbagai pertimbangan seorang guru itu memilih Golkar, antara lain: Pertama, karena anjuran atasan berupa tekanan yang sifatnya struktural dari atasan. Kedua, karena loyalitas sebagai PNS, yang artinya PNS itu harus loyal kepada pemerintah dengan kata lain harus memilih Golkar. Ketiga, aspirasi sendiri.

Bagaimana pendapat Bapak terhadap pernyataan ini?

Eu... betul sekali itu, menurut pendapat saya betul sekali dan memang termasuk saya barangkali saya belum berani secara terang-terangan eu.... apa buka front apa atau..karena saya pikir eu... ada benarnya dan memang benar ... alasan ketiga alasan tadi bahwa faktor keamanan, takut sanksi administratif, lalu kemudian tekanan dari atasan.

Tekanan atau anjuran?

Ya, tekanan dan eu... tapi saya tidak sepenuhnya ketiga alasan itu masuk kategori itu ngak. Saya pernah diancam oleh atasan saya dan saya pernah dipanggil agar.....

Saya mengatakan tolong jelaskan kalau saya melanggar, kalau saya sampai dipecat kan absennya harus jelas. Apakah saya melanggar, apakah saya tidak bertugas, apakah saya indisipliner dan sebagainya. Saya pun tidak, tapi waktu itu menekan saja.....dan memang posisi saya setelah itu tidak mendapat apa-apa, tidak mendapat posisi apa-apa di lapangan pekerjaan saya itu. Sementara yang lain yang istilahnya loyal, loyalitasnya tinggi memperoleh posisi. Padahal saya sudah hampir 19 tahun bekerja.

C. Rangkuman Hasil Penelitian dan Pengujian

Berdasarkan data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persentase guru PNS yang memilih Golkar/ Partai Golkar pada Pemilu 1997 dan Pemilu 1999 sebesar 42.5% atau 51 orang dari sampel 120 orang, persentase guru yang memilih Golkar pada Pemilu 1997 tetapi memilih partai lain pada Pemilu 1999 sebesar 46.67% atau 56 orang, dan 10.83% atau 13 orang adalah persentase guru yang tidak memilih Golkar/ Partai Golkar pada Pemilu 1997 maupun Pemilu 1999. Jadi, ada perbedaan pilihan yang sangat mencolok antara Pemilu 1997 dan Pemilu 1999 dengan perbedaan persentase sebesar 46.67%, dimana guru PNS yang memilih Golkar pada Pemilu 1997 itu mencapai 89.17% sedangkan pada Pemilu 1999 hanya mencapai

42.5%. Perbedaan ini berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan chi-kuadrat dapat disimpulkan sebagai perbedaan tersebut berbeda secara signifikan.

Dalam mempertimbangan partai politik mana yang menjadi pilihan dalam Pemilu 1997 dapat disimpulkan bahwa memilih karena alasan loyalitas sebagai PNS menempati urutan yang paling atas yakni 71.67%, aspirasi pribadi 48.33%, dan memilih karena ada anjuran dari atasan sebesar 40.0%. Sedangkan pada Pemilu 1999 dapat disimpulkan bahwa memilih karena kehendak sendiri tanpa adanya anjuran atau paksaan dari pihak lain menempati urutan yang tertinggi yaitu 99.16%, penilaian tentang keaspiratifan partai dalam memperjuangkan aspirasi guru sebesar 85.0%, perkiraan kemampuan partai dalam pengelolaan negara sebesar 84.17%, dan program-program partai sebesar 83.33%.

Setelah dilakukan pengujian dengan chi-kuadrat diperoleh kesimpulan bahwa (1) tidak terdapat perbedaan yang signifikan pertimbangan pilihan guru dalam memilih pada Pemilu 1997 karena alasan loyalitas dan karena anjuran dari atasan (2) terdapat perbedaan yang signifikan pertimbangan pilihan guru dalam memilih pada Pemilu 1997 karena aspirasi pribadi dengan kata lain bahwa guru yang memilih Golkar pada Pemilu 1997 cenderung menyatakan pilihan itu berdasarkan aspirasi pribadi sedangkan guru yang memilih Golkar pada Pemilu 1997 tetapi memilih partai lain pada Pemilu 1999 dan yang tidak memilih Golkar/ Partai Golkar pada Pemilu 1997 maupun Pemilu 1999 cenderung menyatakan pilihan itu bukan berdasarkan atas aspirasi pribadi (3) tidak ada perbedaan yang signifikan pertimbangan pilihan guru pada pemilu 1999 antara guru yang pilihannya tetap maupun yang berubah dalam hal

pilihan itu karena kehendak sendiri tanpa anjuran atau paksaan dari pihak lain, keaspirasian partai dalam memperjuangkan aspirasi guru, dan penilaian berdasarkan program-program partai. Ada dua faktor pertimbangan yang berbeda secara signifikan, yaitu pertimbangan atas figur ketua umum partai dan perkiraan kemampuan partai dalam mengelola negara. Penjelasan adalah (1) Guru yang tidak memilih Golkar pada Pemilu 1997 dan atau Pemilu 1999 cenderung mempertimbangkan figur ketua umum partai sedangkan guru yang memilih Golkar/Partai Golkar pada Pemilu 1997 dan Pemilu 1999 cenderung tidak mempertimbangkan figur ketua umum (2) Guru yang tidak memilih Golkar pada Pemilu 1997 dan atau Pemilu 1999 cenderung mempertimbangkan perkiraan kemampuan partai dalam mengelola negara sedangkan guru yang memilih Golkar/Partai Golkar pada Pemilu 1997 dan Pemilu 1999 cenderung tidak mempertimbangkan hal tersebut.

Berdasarkan pengujian dengan menggunakan chi-kuadrat juga diperoleh kesimpulan bahwa ada beberapa faktor lain turut membedakan pilihan di kalangan para guru pada Pemilu 1997 dan Pemilu 1999, yaitu: jenis kelamin, pendapatan yang diperoleh per bulan, aktivitas dalam organisasi profesi, dan aktivitas dalam organisasi politik. Diperoleh kesimpulan bahwa (1) pilihan guru perempuan cenderung tetap dan pilihan guru laki-laki cenderung berubah (2) pilihan guru yang pendapatannya per bulannya tergolong rendah cenderung tetap sedangkan yang pendapatannya tinggi cenderung berubah (3) pilihan guru yang aktif di organisasi profesi (PGRI/ISPI), baik sebagai anggota maupun pengurus, cenderung tetap sedangkan yang tidak aktif

cenderung berubah, dan (4) pilihan guru yang pernah aktif di organisasi politik (kebanyakan Golkar), baik sebagai anggota maupun pengurus, cenderung tetap sedangkan yang tidak aktif cenderung berubah.

Secara rinci hasil pengujian hipotesis²⁶ tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 6
HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS

VARIABEL/ SUB-VARIABEL	NILAI χ^2	NILAI TABEL C	H0	H1
1. Usia	0.738	3.84	v	-
2. Jenis Kelamin	4.164	3.84	-	v
3. Jenjang Tempat Mengajar	5.157	5.99	v	-
4. Lama Bekerja	1.084	3.84	v	-
5. Tempat Tinggal	5.437	3.84	-	v
6. Gaji/bulan	0.085	3.84	v	-
7. Pendapatan/ bulan	7.907	3.84	-	v
8. Tingkat Pendidikan	0.101	3.84	v	-
9. Aktivitas Sosial	2.158	3.84	v	-
10. Aktivitas Profesi	6.756	3.84	-	v
11. Aktivitas Politik	8.260	3.84	-	v
12. Pilihan pada Pemilu-97 dan Pemilu-99	34.840	3.84	-	v
13. Pertimbangan Pilihan Pemilu-97				
• Sebagai PNS harus loyal kepada pemerintah (memilih Golkar)	0.480	3.84	v	-
• Atas anjuran atau petunjuk atasan	0.494	3.84	v	-
• Sesuai dengan aspirasi pribadi	27.255	3.84	-	v
• Sesuai dengan kesepakatan keluarga (istri/suami, orang tua)	3.221	3.84	v	-
14. Pertimbangan Pilihan Pemilu-99				
• Aspirasi sendiri, bukan anjuran/paksaan pihak lain	0.119	3.84	v	-

²⁶ Pengujian dilakukan dengan menggunakan rumus chi-kuadrat untuk setiap sel dari variabel/ sub variabel yang diduga mempengaruhi perilaku memilih.

• Figur ketua umum partai	10.532	3.84	-	v
• Calon-calon legislatif yang diajukan partai	2.889	3.84	v	-
• Program-program yang diajukan partai	1.288	3.84	v	-
• Partai dinilai mampu mengelola negara dengan lebih baik	6.335	3.84	-	v
• Partai dinilai mampu memperjuangkan aspirasi guru	1.163	3.84	v	-
• Calon presiden yang diusulkan partai	1.953	3.84	v	-
• Resiko yang paling aman dibanding memilih partai lain	3.527	3.84	v	-
15. Informasi Yang Dominan (Televisi)	1.354	3.84	v	-

Keterangan :

Tingkat signifikansi (α) yang dipakai dalam pengujian ini adalah 0.05.

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan data hasil penelitian dan hasil pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan perilaku memilih yang signifikan di kalangan guru dari Pemilu 1997 ke Pemilu 1999. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai variabel, yaitu: jenis kelamin, tempat tinggal, pendapatan, dan aktivitas di organisasi profesi serta aktivitas di organisasi politik.

Pada Pemilu 1997, faktor pertimbangan yang membedakan pilihan di kalangan guru adalah aspirasi pribadi, dengan kata lain bahwa guru-guru yang perilaku memilihnya tetap menyatakan bahwa memilih Golkar pada Pemilu 1997 itu merupakan pilihan berdasarkan aspirasi pribadi, sedangkan guru-guru yang perilaku memilihnya berubah menyatakan hal yang sebaliknya. Hal ini berarti bahwa perilaku memilih di kalangan guru pada Pemilu 1997 merupakan perilaku yang semu, dimana sebagian dari pilihan mereka itu bukan berdasarkan aspirasi atau kehendak sendiri, tetapi lebih disebabkan oleh adanya faktor luar yang lebih dominan, baik berupa anjuran maupun ancaman. Pilihan mereka mungkin bisa dikategorikan sebagai pilihan yang rasional, khususnya berkaitan dengan adanya anjuran-anjuran atau kesepakatan-kesepakatan kelompok yang mengharuskan mereka memilih Golkar dan atau karena adanya ancaman yang membuat mereka memilih jalan/ alternatif yang paling aman dan dalam upaya meminimalkan resiko.

Pada Pemilu 1999, ada dua faktor pertimbangan yang membedakan pilihan di kalangan guru, yakni; antara guru yang perilaku memilihnya tetap dengan guru yang perilaku memilihnya berubah adalah pertimbangan mereka terhadap ketua umum partai dan penilaian mereka terhadap kemampuan partai dalam mengelola negara menjadi lebih baik. Berbeda dengan pertimbangan pilihan pada Pemilu 1997, perilaku memilih para guru pada Pemilu 1999 terlihat lebih rasional, dalam arti bahwa pilihan tersebut didasarkan pada pertimbangan terhadap program partai, calon-calon yang diajukan, penilaian terhadap kemampuan partai dalam mengelola negara, dan dalam memperjuangkan aspirasi. Pilihan di kalangan guru juga lebih ditentukan oleh faktor internal dibandingkan faktor eksternal. Hal ini berkaitan dengan menurun tajamnya faktor-faktor politis yang dalam pemilu-pemilu sebelumnya lebih dominan.

Berdasarkan teori pilihan rasional, realitas empirik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada Pemilu 1997, hampir seluruh guru yang PNS memilih Golkar dalam pemilu. Guru yang menyatakan memilih Golkar karena aspirasi pribadi dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni; kelompok yang memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu secara pribadi dan kelompok yang merasa terikat oleh kesepakatan-kesepakatan kelompok, dalam hal ini sebagai PNS harus loyal terhadap Golkar. Kelompok yang pertama adalah mereka yang aktif di Golkar dan organisasi-organisasi yang berafiliasi ke Golkar. Mereka mendapatkan keuntungan material maupun non material, berupa kemudahan atau fasilitas bagi peningkatan karir mereka. Dengan kata lain, mereka adalah kelompok yang mencoba memaksimalkan tujuan demi kepentingan

pribadinya. Sedangkan guru yang menyatakan memilih Golkar bukan karena aspirasi pribadi itu merupakan suatu kelompok yang mencoba meminimalkan resiko yang dihadapi. Mereka adalah kelompok yang merasa takut akan sanksi-sanksi yang akan diperolehnya bila tidak memilih Golkar.

Di pihak lain, guru yang tidak memilih Golkar pada Pemilu 1997 merupakan kelompok guru yang berani menanggung segala resiko dan atau kelompok yang memiliki kesadaran bahwa anjuran dan ancaman dalam menentukan pilihan merupakan sesuatu yang tidak benar dan memasung aspirasi sebagai pribadi yang bebas. Mereka sadar bahwa segala kesempatan kelompok yang dibuat oleh kelompok elit dalam birokrasi hanyalah ditujukan untuk kepentingan elit yang bersangkutan dan bukan untuk kepentingan penyaluran aspirasi anggota kelompok pada umumnya.

Pada Pemilu 1999 terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam perilaku memilih di kalangan guru. Kalau dalam Pemilu 1997 lebih dari 90% guru memilih Golkar, akan tetapi pada Pemilu 1999 ini guru yang memilih Partai Golkar hanya berkisar 45% saja. Dari kelompok guru yang masih memilih Golkar pada Pemilu 1999 ini dapat dikategorikan 2 bagian; kelompok pertama adalah mereka yang aktif di organisasi yang berafiliasi ke Partai Golkar dan atau aktif di Partai Golkar, walaupun secara tidak terang-terangan²⁷ sedangkan kelompok yang kedua adalah

²⁷ Berdasarkan wawancara dengan Ketua I Partai Golkar, diperoleh keterangan bahwa setelah Undang-undang tentang Pemilu dan Partai Politik yang baru diberlakukan, hampir semua PNS yang aktif di Golkar menyatakan mengundurkan diri dari organisasi dan memilih meneruskan karir mereka sebagai PNS. Hanya ada satu orang saja yang memilih karir di Partai Golkar dan ia adalah Ketua Partai Golkar.

mereka yang masih bimbang/ ragu untuk berubah dan pada akhirnya memilih Partai Golkar.

Kelompok guru yang tidak memilih Partai Golkar pada Pemilu 1999 adalah kelompok guru yang dengan penuh kesadaran bahwa memilih dalam pemilu merupakan pernyataan bebas seorang warga negara. Pada Pemilu 1999, mereka merasa bahwa pilihan pada pemilu kali ini merupakan pilihan yang didasarkan pada keinginan dan aspirasi pribadinya. Tidak ada lagi anjuran-anjuran dari atasan apalagi berupa ancaman atau sanksi-sanksi.

Jadi, perilaku memilih di kalangan guru pada kedua pemilu di atas, tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan rasional mereka tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, baik faktor sosiologis maupun psikologis. Pada pemilu 1997, yang lebih banyak berpengaruh adalah faktor-faktor eksternal, khususnya faktor-faktor politik dan pertimbangan untung rugi dan meminimalan resiko yang harus dihadapi tatkala mereka tidak memilih Golkar. Sedangkan pada Pemilu 1999, kehendak bebas secara pribadi (aspirasi pribadi) dan pemaksimalan untuk mencapai tujuan lebih mengemuka dibanding faktor lainnya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN IMPLIKASINYA

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perubahan perilaku memilih yang signifikan di kalangan guru, yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Kuningan, dari Pemilu 1997 ke Pemilu 1999.
2. Ada berbagai faktor yang turut mempengaruhi perilaku memilih di kalangan guru. Pada Pemilu 1997, faktor yang lebih mengedepan mempengaruhi perilaku memilih di kalangan guru adalah faktor politik berupa mobilisasi yang dilakukan melalui birokrasi dan pertimbangan untung rugi dalam meminimalkan resiko (*least risk*) bila tidak memilih Golkar. Sedangkan pada Pemilu 1999, faktor yang lebih mengemuka adalah pilihan rasional berupa kehendak bebas secara pribadi dan pertimbangan akan pemaksimalan tujuan (*maximum gained*).
3. Variabel atau faktor lain yang juga turut mempengaruhi secara signifikan adanya perubahan perilaku memilih di kalangan guru dari Pemilu 1997 ke Pemilu 1999 adalah jenis kelamin, tempat tinggal, pendapatan, dan aktivitas di organisasi profesi serta aktivitas di organisasi politik.

B. Implikasi Teoritik

Beberapa implikasi dari kesimpulan hasil penelitian di atas adalah :

1. Bila dikaitkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, misalnya: Pertama, hasil penelitian Pomper yang menunjukkan bahwa predisposisi sosial dan ekonomi pemilih dan keluarga pemilih mempunyai hubungan yang signifikan dengan perilaku pemilih. Kedua, hasil penelitian Lipset di Amerika yang menyatakan bahwa kelompok minoritas di bidang ekonomi, politik, dan diskriminasi-diskriminasi tertentu cenderung memilih partai liberal, sedangkan kelompok mayoritas cenderung memilih partai konservatif. Ketiga, hasil penelitian Denver di Inggris yang menyimpulkan bahwa pilihan seseorang harus dipahami sebagai pernyataan loyalitas (identifikasi partai) yang dibentuk oleh pengalaman (sosialisasi) sepanjang hidup. Keempat, penelitian Aspar di Surabaya yang memperlihatkan bahwa perilaku pemilih penuda perkotaan didasarkan atas pertimbangan rasional, mereka menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan program yang disodorkan dan kandidat/tokoh yang ditampilkan. Kelima, penelitian yang dilakukan Yuswanda dan kawan-kawan di Bandung yang menyatakan bahwa identifikasi partai (ideologi, ikatan keagamaan, ikatan emosional, simpatikan berpengaruh terhadap perilaku pemilih. Dan keenam, penelitian Taqwa di Enrekang yang menjelaskan bahwa tindakan sosial merupakan fungsi dari sikap dan atau situasi sosial, ekonomi, dan kepentingan. Hasil penelitian yang diperoleh ini

ternyata turut menegaskan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Hal ini terlihat dari temuan penelitian yang menyatakan bahwa selain pilihan rasional, ditemukan pula ada beberapa variable lain yang juga berpengaruh secara signifikan dalam perubahan perilaku memilih di kalangan guru dari Pemilu 1997 ke Pemilu 1999, yaitu: jenis kelamin, tempat tinggal, pendapatan, dan aktivitas di organisasi profesi serta aktivitas di organisasi politik.

Dilain pihak, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil temuan peneliti lain, misalnya: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Heath dan Allister di Inggris yang menunjukkan bahwa pengaruh kelas pada perilaku sangat kecil. Kedua, hasil temuan Gaffar yang memperlihatkan bahwa pengaruh kelas dalam perilaku memilih di Indonesia ternyata tidak dominan. Tidak ada perbedaan kecenderungan perilaku politik antara mereka yang termasuk kategori orang kaya ataupun orang miskin. Dan ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro di Jawa Tengah yang memperlihatkan bahwa pendekatan pilihan rasional ternyata tidak dapat menjelaskan perubahan perilaku memilih pada masyarakat masyarakat desa. Kecenderungannya bahwa masyarakat memilih OPP lebih dipengaruhi oleh ajakan tetangga daripada program yang ditawarkan partai, masyarakat juga tidak memiliki informasi yang akurat, dan dalam menentukan pilihannya tersebut merasa tidak bebas.

2. Hasil penelitian ini telah memberikan gambaran bahwa dalam suatu kondisi politik yang represif, kehendak bebas individu seringkali tidak tampak dalam suatu perilaku dan yang muncul adalah perilaku semu sebagai aktualisasinya. Oleh karena itu untuk memahami aspirasi atau keinginan, harapan, dan dukungan masyarakat atau individu yang sebenarnya, kondisi politik yang terbuka dan demokratis perlu dikembangkan, baik yang berkaitan dengan sistemnya maupun budaya masyarakatnya. Dengan demikian, pemilu sebagai suatu proses penjaringan aspirasi/ dukungan masyarakat atau individu akan dapat memunculkan aspirasi atau dukungan yang sebenarnya.
3. Melalui hasil penelitian ini, peneliti menganjurkan untuk melakukan penelitian lanjutan yang terkait dan dapat melengkapi hasil penelitian yang telah ada. Apakah memfokuskan pada penggunaan teori dan pendekatan yang berbeda, maupun lebih menekankan pada aspek-aspek metodologis yang meliputi variabel yang lebih kompleks dan atau objek/ sasaran penelitian yang lebih beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Siti, 1998, "Perilaku Politik dalam Perspektif Public Choice" dalam *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, Tahun XI Nomor 1 Januari 1998, Surabaya; FISIP Universitas Ailangga.
- Andrews, Frank M. & Klem, Laura et.al., 1981, *A Guide for Selecting Statistical Techniques for Analyzing Social Science Data*, The University of Michigan; Survey Research Center, research Institute for Social.
- Aspar, Muhammad, 1997, "Perilaku Politik Pemuda Perkotaan; Kasus Surabaya", *Analisa*, Jakarta,; CSIS.
- _____, "Beberapa Pendekatan dalam Memahami Perilaku Pemilih", *Jurnal Ilmu Politik*, No. 16, Jakarta; Gramedia.
- Creswell, John W., 1994, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, New Delhi; Sage Pub.
- Gaffar, Afan, 1992, *Javanese Voters; A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*, Yogyakarta; UGM Press.
- Goodin, Robert G. & Klingemann, Hans-Dieter, 1996, "Political Economy: Downsian Perspectives", *A New Handbook of Political Science*, New York; Oxford University Press Inc.
- Haris, Syamsuddin (Koord.), 1997, *Pemilihan Umum di Indonesia: Telaah atas Struktur, Proses, dan Fungsi*, Jakarta; PPW-LIPI.

- Johnson, Doyle Paul, 1986, *Teori Sosiologi: Klasik dan Modern*, Jilid 1 dan 2 (Alih bahasa oleh Robert M.Z. Lawang), Jakarta; Gramedia.
- Kohout, Frank. J., 1974, *Statistics for Social Scientist*, New York; John Wiley & Sons.
- Krejchi, R.V. & Morgan, D.W., 1970, *Determining Sample Size for Research Activities*, Educational and Psychological Measurement Journal, No. 30, Hal. 87-91.
- Kristiadi, J., 1996, *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia*, Jakarta; Prisma Nomor 3. hal.73-91.
- Kuncoro, Bambang, 1998, *Perilaku Politik Warga Pinggiran (Studi tentang Perubahan Perilaku Memilih Warga Desa pada Pemilu tahun 1971 - 1997 di Desa Sunyalangu Kabupaten Banyumas Jawa Tengah)*, Surabaya; Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Melberg, Hans O., 1993, *Three Arguments about Rational Choice Theory in Sociology*, <http://home.sol.no/hansom/papers/930520.htm>).
- Ritzer, Goerge, 1992, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (Penyadur; Alinandan)*, Jakarta; Rajawali Press.
- Ritzer, George, 1996, *Sociological Theory* (Fourth Ed.), USA; Mc. Graw-Hill Comp.
- Siegel, Sidney, 1994, *Statistik Nonparametrik untuk Ilmu-ilmu Sosial (Cetakan Keenam)*, Jakarta; Gramedia.
- Singarimbun, Masri & Effendi, Sofian (ed.), 1995, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta; LP3ES.

- Sudarminta, J., 1998, "Citra Guru Semakin Terpuruk", *BASIS*, No. 01-02 Tahun ke-47, Januari - Februari 1998, Hal. 74-81.
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Pemilihan Pada Pemilu 1992; Antara Kendala dan Peluang*, Seminar Nasional AIPi IX, Surabaya, 6-8 Agustus 1992.
-, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta; Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Taqwa, M. Ridhah, 1996, *Perilaku Politik Ummat Islam: Kasus di Lekkong-Enrekang 1971-1992*, Jakarta; Prisma Nomor 3. hal.35-46.
- Yuswanda, Awan dkk., 1993, *Pengaruh Identifikasi Partai Terhadap Perilaku Pemilih dalam Pemberian Suara pada Pemilu 1992 (Studi Kasus Mahasiswa Fisip Unpad)*, Bandung; Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.
- Zamroni, 1992, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Yogyakarta; Tiara Wacana Yogya.
- Zanten, Wim van, 1994, *Statistika untuk Ilmu-ilmu Sosial (Edisi Kedua)*, Jakarta; Gramedia.

LAMPIRAN

Kata Pengantar

Dengan hormat,
 Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Semoga keselamatan, limpahan rahmat, dan hidayah Allah tetap menyertai Bapak dan Ibu.
 Di akhir studi saya di Program Magister Ilmu-Ilmu Sosial (Sosiologi Politik) Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, saya bermaksud mengadakan survey untuk melengkapi pemuisan tugas akhir.
 Survey ini berkaitan dengan perilaku memilih di kalangan guru pada dua periode pemilu yang telah dan baru saja berlalu, yaitu Pemilu 1997 dan Pemilu 1999. Survey ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan partai politik dan atau instansi manapun kecuali sebatas untuk kepentingan ilmiah dalam penyelesaian studi semata.
 Demi menjaga kerahasiaan informasi yang Bapak/Ibu berikan dalam kuesioner ini Bapak/Ibu tidak perlu mencantumkan identitas diri, seperti; nama, alamat, nama daerah, ataupun nama sekolah tempat mengajar.
 Agar kebenaran ilmiah tercipta dan data yang diperoleh melalui kuesioner ini menjadi berarti, maka saya sangat berharap Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban yang sebenarnya.
 Atas bantuan Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Rudi Susilana Nim. 099712715M
 Mahasiswa Program Magister Ilmu-Ilmu Sosial
 Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

KUESIONER

Petunjuk Pengisian:
 Lingkariilah huruf di depan pilihan jawaban yang paling sesuai dengan diri Bapak/Ibu. Khusus untuk isian tertentu, yaitu: untuk isian dengan tanda (V) dan isian langsung, isilah pada tempat yang telah disediakan.
 Kolom ketiga (3) tidak perlu diisi, karena akan digunakan untuk pengkodean data (CD).

1	2	3
IDENTITAS RESPONDEN		
1	Usia :
2	Jenis Kelamin : a. Perempuan b. Laki-laki	
3	Agama : a. Islam b. Katolik c. Protestan d. Budha e. Hindu	
4	Menyadi pendidik di : a. SD b. MI c. SMP d. MTs e. SMU/K L. MA	
5	Lama Bekerja :
6	Alamat Rumah : a. Kampung b. Desa c. Kota Kecamatan d. Kota Kabupaten	
7	Gaji per bulan : a. Kurang dari 300.000 b. 300.000 - 600.000 c. 600.000-1.000.000 d. 1.000.000 lebih	
8	Penghasilan di luar gaji/bulan (termasuk gaji istri/suami) : a. Kurang 300.000 b. 300.000 - 600.000 c. 600.000-1.000.000 d. 1.000.000 lebih	
9	Pendidikan terakhir : a. Setingkat SLTP b. Setingkat SLTA c. Diplomas. D1, D2, D3 d. Sarjana	
10	Aktivitas pada organisasi kemasyarakatan dan keagamaan Nama organisasi :	Jabatan di organisasi :
	• Dess. RT/RW dan LKMD	
	• Karang Taruna	
	• DKM dan sejenisnya	
	• PKK, Pos Yandu	

3	Dari sumber informasi apa saja Bapak/Ibu mengetahui tentang partai-partai politik pada Pemilu 1997?	Ya	Tidak
	Sumber Informasi:		
	a. Televisi		
	b. Radio		
	c. Surat Kabar, Tabloid, Majalah		
	d. Rekan sejawat		
	e. Arasan di tempat kerja		
	f. Keluarga (istri/suami, kerabat)		
	g. Aktifis partai		
	h. Lainnya (jangan lupa)		
4	Sumber informasi manakah yang lebih dominan menentukan partai yang dipilih Bapak/Ibu dalam Pemilu 1997 (pilih satu dari kedelapan sumber informasi di atas)		